

Tanya Jawab

MODERASI BERAGAMA

TANYA JAWAB

MODERASI BERAGAMA

TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA

Copyright 2022 oleh PPIM UIN Jakarta

Tim Penulis : Aptiani Nur Jannah, Bobby Suwandi, Febiyana,
Fikri Fahrul Faiz, Fuad Jabali, Ibnu Kharish
(Ustadz Ahong), M. Adib Misbachul Islam

Editor : Endi Aulia Garadian

Layouter : Oryza Rizqullah

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta

Jalan Kertamukti No. 5 Cireundeu, Ciputat Timur

Kota Tangerang Selatan Banten 15419 INDONESIA

Telp. (62 21) 749-9272

Email: ppim@uinjkt.ac.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN—V

PENGANTAR BUKU TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA—VII

BAB 1 | SEPUTAR MODERASI BERAGAMA—1

BAB 2 | MELAWAN EKSTREMISME DENGAN MODERASI BERAGAMA—21

BAB 3 | MODERASI BERAGAMA UNTUK SEMUA—31

BAB 4 | NEGARA, AGAMA, DAN MODERASI BERAGAMA—53

BAB 5 | BENARKAH MODERASI BERAGAMA DICIPTAKAN OLEH BARAT?—79

BAB 6 | AKHIR UNTUK AWAL—105

SAMBUTAN

*Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabaraka-
tuh.*

Buku Tanya Jawab ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Buku *Akar Persoalan Bangsa: Jawaban Moderasi Beragama* yang telah ditulis oleh tim penulis Policy Engagement, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika tulisan sebelumnya merupakan "buku besar" yang dapat menjadi rujukan bagi siapa saja untuk mendalami moderasi beragama dari hulu ke hilir, maka buku ini adalah "buku kecil" yang menjadi penyokong seseorang dalam memahami moderasi beragama. Buku ini hadir dengan bahasa

dan format yang lebih sederhana agar lebih mudah dicerna oleh segala kalangan.

Moderasi Beragama acapkali disalahartikan oleh berbagai kelompok sebagai upaya pelemahan agama. Tentu saja ini adalah pemahaman yang berangkat dari kesalahpahaman saja. Di mesin pencari, kata 'moderasi beragama' sering muncul beriringan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan kebingungan atas nilai ini. Begitu juga ditemukan di media sosial. Ketika mencari topik 'moderasi beragama' di platform media Twitter misalnya, bermunculan pertanyaan-pertanyaan terkait moderasi beragama. Sering kali, pertanya-

an yang mencuat baik di mesin pencari maupun media sosial kemudian dijawab oleh sebagian kelompok yang salah kaprah memahami moderasi beragama. Buku ini hadir untuk memberikan penjelasan alternatif mengenai pemahaman yang keliru akan moderasi beragama yang beredar di dunia maya dan mungkin di benak pembaca sekalian. Jawaban yang berimbang dan disajikan dengan lebih sederhana diharapkan mampu merespons keingintahuan masyarakat akan moderasi beragama.

Saya berharap buku *Tanya Jawab Moderasi Beragama* ini dapat berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama. Penjelasan yang lebih mendalam seputar moderasi

beragama termasuk lingkup dan batasan, pengalaman dan hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dibaca dalam buku ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang sangat berjasa dalam menghadirkan buku ini ke hadapan pembaca sekalian.

Selamat membaca dan menyelami makna moderasi beragama yang sesungguhnya.

Ciputat, 4 April 2022

Fuad Jabali, Ph.D

Koordinator Policy Engagement

PENGANTAR BUKU TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA

Pada suatu Jum'at, seorang khatib menyampaikan sebuah ceramah tentang moderasi beragama. Ceramahnya menggebu-gebu, penuh semangat, seolah ingin membuat yakin para jamaah yang sedang menyimak sembari duduk bersila. Yang tertidur jadi terbangun. Yang terbungong jadi tersadar. Yang sedang menyimak semakin serius menyimak. Sang khatib berkata bahwa moderasi beragama, moderasi agama, Islam moderat, adalah sama. Semuanya akal-akalan pemerintah untuk men-

jauhkan kaum muslimin dari agamanya, katanya. Pada kesempatan lain, seorang ustadzah di kanal YouTube, dengan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 atau RPJM (diucapkan olehnya tanpa huruf "N" untuk menghilangkan kata "Nasional" di dalamnya), mengatakan bahwa moderasi beragama merupakan upaya sekularisasi, terutama agar Islam tidak masuk ke ranah konstitusi. Lantas, benarkah demikian?

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam

rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebinekaan. Lebih lanjut tertulis bahwa masyarakat Indonesia yang memeluk beragam agama perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama. Dari dokumen ini saja terlihat bahwa moderasi beragama yang dimaksud si khatib dan si ustadzah jauh panggang dari api.

Sementara itu, masyarakat punya banyak kebingungan seputar moderasi beragama. Sangat bisa dipahami bahwa tidak mungkin semua masyarakat Indonesia membaca dokumen RPJMN 2020-2024 yang sudah dirilis oleh pemerintah. Ada kekosongan antara apa yang ingin diutarakan oleh pemerintah dengan keadaan masyarakat. Jelas ini adalah

sebuah masalah. Namun, masalah ini makin besar karena ada orang-orang yang dianggap “otoritatif” dalam menjelaskan persoalan keagamaan, misalnya seperti ustadz, ustadzah, ulama, pendeta, habib, pemuka agama secara umum, guru agama, dan dosen, tapi menjelaskan moderasi beragama dari perspektif kepentingan yang dianutnya. Bagi yang benci kepada pemerintah, moderasi beragama tidak ada sisi baiknya. Bagi yang mendukung pemerintah, moderasi beragama tidak ada sisi buruknya. Bineritas semacam ini justru di luar dari esensi awal moderasi beragama yang menekankan titik tengah sebagai titik pertemuan berbagai kutub ekstrem. Dari semua ini, masyarakat akhirnya yang paling dirugikan karena terperangkap pada pandangan-pandangan ekstrem seperti itu.

Buku ini, meskipun sangat jauh dari kata sempurna, berusaha menjembatani kebingungan masyarakat dengan apa yang ingin diutarakan oleh pemerintah terkait kebijakan moderasi beragama.

Isinya tidak sepenuhnya ungkapan *cliché* tentang baiknya moderasi beragama. Justru, ada kritik-kritik yang bisa ditemukan dalam buku ini, mengingat kritik juga perlu dilakukan kepada pemerintah agar bisa menjalankan amanah dari masyarakat lebih baik lagi. Isi buku ini secara umum adalah pertanyaan-pertanyaan seputar moderasi beragama. Ada pertanyaan yang sangat dasar mengenai moderasi beragama mulai dari apa itu arti moderasi? Apa arti moderasi beragama? apa bedanya pula dengan moderasi agama? hingga pertanyaan yang sangat dekat dengan keseharian kita seperti, bagaimana menjalankan moderasi beragama? atau apakah orang Islam diperintahkan untuk menganut moderasi beragama?

Pembaca akan menemukan puluhan pertanyaan yang terkait atau bahkan menyerempet isu-isu moderasi beragama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima bab, sesuai dengan kedekatan maupun irisan an-

tara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Bab pertama merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar seputar moderasi beragama. Bab kedua berisi pertanyaan tentang moderasi beragama untuk mengeliminasi ekstremisme kekerasan. Bab ketiga bagaimana umat beragama, tidak hanya Islam, sebaiknya memperlakukan moderasi beragama. Bab keempat menjawab pertanyaan mengenai hubungan moderasi beragama dengan negara, konstitusi, dan semacamnya. Sementara bab kelima menjawab tuduhan-tuduhan apakah moderasi beragama proyek Barat, ataupun berkaitan dengan paham-paham global yang berupaya “menghancurkan” semangat keagamaan umat Islam di Indonesia. Di bab terakhir, bab keenam, pembaca juga akan menemukan semacam refleksi ketika buku ini disusun.

Kami para penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang selalu berada di tengah

titik-titik ekstrem itu berada. Sesuai dengan preambule UUD 1945 yang menerangkan bahwa kita sebagai orang Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan moderasi beragama adalah satu satu upaya untuk menuju hal tersebut, justru bukan menjadi upaya

yang ingin menjadi ekstrem yang lain di antara ekstremitas upaya yang telah ada selama ini. Selamat membaca, semoga pertanyaan pembaca dapat terjawab setelah membaca buku ini!

Para Penulis
Ciputat, 4 April 2022

BAB 1 | SEPUTAR MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama dipahami berbeda-beda di tengah masyarakat, terutama dalam kelompok muslim Indonesia itu sendiri. Ada yang bilang bahwa moderasi beragama itu berbahaya bagi umat Islam karena mengaduk-aduk keimanan seseorang. Ada yang bilang bahwa moderasi beragama adalah upaya untuk memoderasi ajaran Islam. Ada juga yang bilang kalau moderasi beragama sama dengan Islam moderat. Bagi orang awam, hal ini membingungkan. Di satu sisi ada keinginan bagi publik

untuk mengetahui hal ini dari perspektif negara, namun di sisi lain suara-suara dari banyak kelompok turut membuyarkan makna moderasi beragama yang menjadi bagian kebijakan nasional, sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada bab ini, para penulis berupaya mengurai pertanyaan-pertanyaan dasar tentang apa yang dimaksud dengan moderasi, moderat, dan tentu saja moderasi beragama itu sendiri.

APA ARTI MODERASI?

Moderasi, versi simpelnya, adalah kemampuan seseorang atau sebuah komunitas menemukan posisi yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Moderasi juga berarti fleksibel dengan keadaan untuk menstabilkan titik-titik ekstrem. Kunci dari moderasi beragama adalah menemukan kompromi di antara tarik menarik berbagai kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkarinya. Memang sangat tidak mudah menemukannya. Titik temu selalu dinamis, berubah-ubah dari satu kelompok ke kelompok lain dari satu isu ke isu lain. Bahkan dalam diri sendiri sekalipun. Kompromi di ranah sosial tidak selalu bisa baik untuk kompromi di ranah politik atau di ranah ekonomi. Kalau untuk menemukan titik temu bagi diri sendiri saja tidak mudah, bagaimana kalau untuk orang lain, 2 orang lain, 3 orang lain, satu keluarga, 1 RT, 1 RW, 1 desa, 1 kabupaten, 1 provinsi, 1 negara? Sama sekali tidak mu-

dah mengemban tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat yang lebih luas. Hanya orang-orang yang sangat cerdas, sangat bijaksana, dan sangat tulus (tanpa kepentingan diri atau kelompok sempit yang akan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas) yang mampu menggendong amanah ini. Saking beratnya, Islam memberi pahala yang sangat besar bagi para pemimpin adil, sebab hanya keadilan yang bisa melahirkan putusan terbaik bagi masyarakat yang lebih luas. Bayangkan apa siksaannya kalau ada lurah, camat, bupati, gubernur, dan presiden yang mengkhianati amanat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya? Mereka malah mengambil bukan hanya kesejahteraan rakyat yang ada sekarang tetapi juga keturunan mereka yang akan datang. Mereka harus ikut menyicil utang yang sudah dikorupsi para pemimpinnya, yang telah dipilih melalui proses pemilihan dengan ongkos yang sangat mahal pula.

Moderasi, versi simpelnya, adalah kemampuan seseorang atau sebuah komunitas menemukan posisi yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Moderasi juga berarti fleksibel dengan keadaan untuk menstabilkan titik-titik ekstrem.

Dua hal penting perlu digarisbawahi dalam moderasi ini. Ini adalah penjabaran versi kompleks dari moderasi. *Pertama*, ia punya sifat yang dinamis. *Kedua*, ia juga selalu berpihak ke mayoritas, atau ke manusia terbanyak. Dia dinamis karena keberadaan posisi tengah sangat ditentukan oleh pergerakan pihak-pihak yang tengah ditengahinya. Kalau hanya ada dua ekstrem yang saling bertarikan, maka hanya ada satu posisi tengah yang berada di garis lurus yang kedua ujungnya diakhiri dengan ekstremitas. Ujung kiri disebut ekstrem kiri dan di ujung kanan disebut ekstrem kanan. Posisi ekstrem kiri dan kananpun berubah-ubah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu lain, dan dari satu isu ke isu lain, sehingga posisi tengahnya juga akan berubah-ubah sesuai konteks. Yang lebih kompleks lagi adalah keti-

ka keragaman yang ada di kelompok ekstrem juga diurai. Yang disebut, atau menyebut dirinya, ekstrem kanan terdiri dari kelompok-kelompok yang sangat beragam, misalnya dilihat dari sisi kepentingan pragmatis dan orientasi idealnya dan dari sisi sebaran generasional maupun geografisnya. Demikian juga keragaman yang ada di kelompok ekstrem kiri. Kemampuan menemukan posisi tengah akan lebih menantang lagi kalau garisnya tidak ditarik dari kiri dan kanan, tetapi dari atas ke bawah, utara ke selatan, plus bagian-bagian posisi yang lebih detail di antara pemilahan arah. Kalau dibayangkan titik temu tidak lagi di antara kiri dan kanan, tetapi ada di tengah lingkaran dengan pembagian garis pemisah di dalam lingkaran yang sesungguhnya tak terhingga.

Bahwa moderasi selalu mencerminkan posisi manusia terbanyak, bisa ditarik dari karakter utama ekstremitas. Kelompok ekstrem jumlahnya selalu sedikit. Semakin ekstrem, semakin sedikit lagi. Hampir dalam setiap survey, pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu yang sangat sensitif selalu dijawab oleh sedikit orang. Misal saja, jumlah responden yang setuju dengan pandangan bahwa pemerintah adalah *thaghut* yang boleh diperangi sangat sedikit. Tidak jauh sampai 5%. Namun, dari jumlah penduduk muslim yang demikian banyak di Indonesia, paling tidak 235,73 juta jiwa per 2021, jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Satu persen saja orang yang setuju dengan bom bunuh diri jumlahnya adalah 2,3 jutaan orang. Satu atau dua orang yang melakukan bom bunuh diri akan menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi dan politik yang luar biasa besarnya. Liputan media, baik na-

sional maupun internasional, yang sangat meluas, membangun imej buruk tentang Islam di Indonesia. Dari sisi aktifitas, kelompok-kelompok ekstrem adalah kelompok yang sangat aktif untuk terus menjual ide dan merekrut anggota baru agar mereka tidak terus menerus menjadi minoritas. Ketekunan itu bisa jadi berhasil jika kelompok mayoritas tidak begitu peduli dengan masa depan ide atau ajaran yang dianutnya.

Cueknya kelompok mayoritas terhadap masa depan dirinya bisa ditemukan di semua mayoritas, baik komunitas agama maupun komunitas non-agama. Karena sudah menjadi kelompok mayoritas, segala sesuatu yang menjadi karakter utama mayoritas itu tidak lagi dipikirkan secara sadar. Di Indonesia yang mayoritas Sunni, jarang sekali ditemukan orang Syiah atau Ahmadiyah di desa-desa di Indonesia. Kalaupun ada di desa-

Bahwa moderasi selalu mencerminkan posisi manusia terbanyak, bisa ditarik dari karakter utama ekstremitas. Kelompok ekstrem jumlahnya selalu sedikit.

desa, biasanya mereka tinggal bersama membentuk kantong-kantong kecil dengan masjidnya sendiri, dengan segala ritualnya yang khas. Kalau di sebuah desa semua masyarakatnya Sunni, tidak ada kepentingan untuk menegaskan bahwa dirinya adalah Sunni. Mungkin juga tidak akan bertanya apa beda Sunni dengan Syiah. Sementara orang Syiah, karena minoritas, akan sangat sadar dengan perbedaan itu. Kalaupun di desa itu ada orang Syiah, biasanya dia akan pindah bergabung dengan komunitas Syiah di desa lain sehingga jati dirinya bisa tetap terpelihara dan diam-diam berusaha keras menegaskan kesyiahannya dan mewariskan kesyiahannya itu kepada keluarganya. Keinginan kuat kelompok minoritas untuk terus mempertahankan jati dirinya membuat mereka lebih militan dibanding kelompok mayoritas.

Dalam perspektif agama, secara sederhana moderasi digambarkan sebagai posisi tengah (*ta-wasut, ta'wazun*) yang ada di antara dua sisi ekstrem:

ekstrem kiri (diidentikkan dengan Komunisme dan liberalisme) dan ekstrem kanan (diidentikkan dengan kelompok Islam militan). Kalau kiri adalah orang-orang yang membela kepentingan manusia dan kanan kepentingan Tuhan, maka ekstremisme, atau sikap berlebihan dalam hal apapun, baik ketika memperjuangkan kepentingan dan ajaran manusia maupun kepentingan dan ajaran Tuhan, tetap dilarang. Kalau agama adalah titik temu terbaik antara ketuhanan dan kemanusiaan, maka memihak sepenuhnya kepada manusia sampai melupakan Tuhan itu dilarang. Demikian juga sebaliknya, memihak kepada Tuhan sampai melupakan manusia juga sangat tidak dianjurkan. Bisa jadi membela manusia malah harus didahulukan daripada membela Tuhan karena sesungguhnya agama yang diturunkan Tuhan, yang kita anut itu, adalah untuk kebaikan manusia. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Tanpa manusia, Tuhan tetap Tuhan Yang Maha Baik, Maha segala-galanya. Dia tidak

memerlukan manusia. Manusalah yang memerlukan Tuhan karena pada dasarnya manusia tidak mengerti siapa dirinya, buat apa ada di dunia ini, bagaimana cara berpikir dan bersikap dan berperilaku yang baik agar tidak merusak diri dan lingkungannya kalau tidak Tuhan yang membimbing.

Memang ada juga manusia yang merasa dan berpikir bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa bahwa alam ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, dan bisa mengatur dirinya dengan hukum-hukum yang dibuatnya sendiri. Demikian juga manusia. Mereka bisa mengatur dirinya sendiri dengan hukum-hukum yang dibuatnya sendiri. Tidak perlu hukum Tuhan. Tidak dipikirkan bahwa manusia itu terbatas dan hukum-hukum yang dibuat manusia akan terjerembab pada batas-batasnya sendiri, tanpa bisa keluar dari batas itu dan bahkan bisa memakan dirinya sendiri. Seperti pagar makan tanaman. Tidak dipikirkan bahwa manusia


yang lemah memerlukan hukum yang kuat yang berasal dari Dzat Yang Maha Kuat. Tidak juga dipikirkan bahwa manusia bisa melampaui batas-batas kemanusiannya tanpa merusak dirinya jika dihubungkan dengan keluasan dan ketinggian Allah. Kemampuan untuk menjadi manusia super (atau *insan kamil*) yang bisa menjadi wujud ideal kemanusiaan terbaik untuk memimpin manusia lain yang tidak bisa keluar di lingkaran sistem kehidupan yang dibuatnya sendiri. Contoh terbaik *insan kamil* adalah Nabi Muhammad, yang tetap menjaga kemanusiaannya walau dirinya dihubungkan dengan nilai-nilai ketuhanan, bahkan menghidupi dan memperjuangkannya. Perjuangan yang tidak memberangus kemanusiaan diri dan masyarakatnya, malah mengangkatnya ke keluasan dan ketinggian hidup yang sesungguhnya menjadi impian setiap orang. Keberhasilan Nabi menjadi model keberhasilan moderasi beragama yang harus kita tiru.

Dalam agama, pengingkaran pada nilai-nilai ketuhanan tertinggi adalah kesombongan yang luar biasa, yang akan selalu ada sejak nabi-nabi diutus. Ketaatan dan kesombongan sama-sama diberi ruang oleh Allah atas dasar kemerdekaan memilih yang diberikan-Nya kepada manusia. Pilihan yang kelak di hari akhir harus dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Walau keduanya diberi ruang, agama sama sekali tidak menganjurkan untuk sombong. Sebagai pencipta, Tuhan tahu bahwa manusia itu memiliki banyak keterbatasan dengan kecenderungan kuat melawan kebaikan, tentu saja dengan segala pertolongan dan bujuk rayu iblis. Ketidakmampuan mewujudkan sepenuhnya nilai-nilai dan ajaran Tuhan dikompensasi dengan moderasi sebagai prinsip utama dalam beragama. Moderasi beragama adalah wujud penyerahan diri pada nilai, ajaran, dan hukum Allah sesuai kemampuan kita menjalankannya. Ketika hukum dijalankan sesuai kemampuan akan ada keragaman pilihan

dan cara sesuai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang melatarbelakangi masing-masing.

Apakah masing-masing harus memaksakan pilihan dan cara masing-masing kepada orang lain? Tidak. Hukum dijalankan untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Pemaksaan akan berakhir dengan kekerasan dan konflik bahkan peperangan. Moderasi beragama adalah jalan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam menjalankan agama sesuai dengan tujuan agama yang paling tinggi: mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di bumi. Orang yang tidak meyakini tentang adanya kehidupan akhirat tetap harus diwujudkan kesejahteraan dan kebahagiaannya secara bersama-sama. Bagaimana nasib dia di akhirat nanti adalah tanggung jawabnya.

Keentingan siapa yang harus dipertimbangkan dalam moderasi? Keentingan manusia yang



Moderasi beragama adalah jalan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam menjalankan agama sesuai dengan tujuan agama yang paling tinggi: mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di bumi.

lebih banyak. Termasuk di dalamnya kepentingan orang-orang yang tidak beragama. Atau beragama tetapi tidak sesuai dengan agama yang kita yakini. Bukan kepentingan manusia semata, apalagi sendirian, atau kepentingan Tuhan yang juga menyendiri dari segala makhlukNya (*qiyamuhu binafsihi*).

Untuk menemukan posisi moderat sangatlah tidak mudah terutama dalam suasana yang sangat kompleks, dimana tarik-menarik antara kepentingan kelompok dengan latar belakang sosial, ekonomi, politik dan budaya bertemu. Dalam keadaan ini posisi tengah tidak lagi membentangi dari kiri ke kanan, tetapi seperti gulungan benang kusut bulat. Bagian manapun yang ditarik, bagian lain akan ikut tertarik. Untuk menemukan titik temu gulungan harus diurai dan ditelusur terlebih dahulu di setiap untaian benang yang ada dalam gulungan kusut itu. Benar-benar diperlukan orang yang sangat bijaksana, cerdas, dan sabar. Akhirnya, kami bisa sampaikan bahwa itulah yang dimaksud

dengan moderasi, baik itu versi sederhana maupun versi kompleks.

APA ARTI MODERASI BERAGAMA?

Moderasi beragama adalah cara beragama terbaik untuk kemaslahatan umat manusia. Karena agama diperuntukan untuk kebaikan manusia, maka wujud kebaikan dari semua ajaran agama harus dibermanfaatkan kepada sesama manusia. Tanpa pandang bulu. Semakin banyak manusia yang mengambil manfaat dari perbuatannya semakin baik kedudukannya di mata Tuhan. Kekasih Allah, Muhammad, bahkan bilang: “*khayrukum anfa’ukum linnas*,” “sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia”. Semakin baik amal kemanusiaannya, semakin senang Allah memandangnya.

Mengamalkan ajaran agama sepenuhnya untuk kebaikan manusia menjadi sangat menantang karena di wilayah manusia ada banyak keterbatasan. Ajaran agama yang sangat luas pun harus

Moderasi beragama adalah cara beragama terbaik untuk kemaslahatan umat manusia. Karena agama diperuntukkan untuk kebaikan manusia, maka wujud kebaikan dari semua ajaran agama harus dibermanfaatnkan kepada sesama manusia.

dipraktekan dalam keterbatasan kemanusiaan kita masing-masing. Batas Gus Dur berbeda dengan batas Cak Nur. Batas Gus Dur hanya pas dipakai untuk dirinya. Tidak untuk orang lain. Juga untuk Cak Nur. Pasti bukan untuk kedua presiden kita di masa lalu, Soekarno dan Soeharto. Soekarno akan berislam sesuai dengan batas-batas kemanusiaan yang dimilikinya. Dalam keyakinannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, agama, termasuk Islam yang dia yakini, harus digabungkan dengan nasionalisme dan komunisme. Penyatuan ini, dalam pandangannya sebagai seorang nasionalis, bisa menjadi kekuatan besar melawan kolonialisme dan neokolonialisme demi Indonesia jaya. Usaha menyatukan ketiga hanya baik untuk dirinya. Ketika dijadikan pijakan bagi keragaman masyarakat Indonesia, usaha tersebut

gagal. Islam yang sangat menjunjung tinggi keesaan Tuhan disandingkan dengan komunisme yang, dalam berbagai propgandanya, mendeklarasikan kematian Tuhan dan melihat agama sebagai candu. Soekarno juga mengalami kesulitan untuk mempertemukan nilai-nilai Islam yang tak terbatas dengan keindonesiaan dalam batas-batas kultural dan geografisnya. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah paham keindonesiaan yang dia miliki jauh melampaui paham keislaman yang dimilikinya. Dialog keduanya menjadi sangat pincang dan tidak berakhir dengan kebulatan. Hasilnya penyok.

Kesulitan Soekarno dirasakan juga oleh Soeharto. Sementara Soekarno mengembara secara intelektual, Soeharto tumbuh dalam tradisi Jawa yang sangat kental. Dia berhasil membubarkan komunisme sehingga tidak lagi menjadi perso-

alan dengan titik temu dengan Islam agama yang dianutnya. Tapi dia punya persoalan dengan upaya mempertemukan Islam dengan kejawaannya. Tumbuh dalam tradisi keislaman yang sangat terbatas, ketika keislamannya dipertemukan dengan kejawaannya, kejawaan lebih dominan. Ketika keislamannya bertambah luas di akhir hayatnya, keislamannya lebih bisa mewadahi kejawaannya lebih baik lagi. Sebagai presiden yang juga sangat peduli dengan nasib rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, keislamannya sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasionalnya yang lebih memberi ruang bagi keislaman yang dia anut.

Soekarno dan Soeharto pada dasarnya memiliki tantangan yang sama bagaimana mempertemukan nilai-nilai keislaman yang tak terbatas dalam batas-batas kemanusiaannya baik di ranah sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Titik temu keduanya pun berbeda sebab masing-masing Soekarno dan Soeharto tumbuh dalam pengalam-

an sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama bernasib malang di akhir hayatnya. Dalam konteks keindonesiaan, titik temu yang mereka kembangkan tidak bisa tidak harus mempertimbangan posisi dan kepentingan masyarakat muslim sebaik-baiknya. Bukan karena Islamnya karena mereka adalah mayoritas. Kalau agama adalah untuk kebaikan manusia, dan manusianya adalah kebanyakan Islam, maka titik temu terbaik moderasi beragama harus ada di wilayah Islam. Nasib baik kedua presiden itu bisa jadi karena kegagalannya menemukan titik terbaik di wilayah ini. Dengan kata lain, mereka gagal karena tidak memberikan kebaikan yang paling banyak terhadap masyarakat Indonesia yang kebanyakan Islam. Terlalu ke kiri akan berakhir dengan petaka. Terlalu ke kanan juga sama karena ekstrem kanan, bukan hanya menolak kelompok kiri, tetapi juga menafikan keragaman kelompok kanan yang ada di dalamnya.

Moderasi beragama akan membekali seseorang dengan kesadaran kuat tentang keragaman posisi yang ada dalam masyarakat dan akan bisa mengambil keputusan terbaik untuk kebaikan masyarakat terbanyak itu. Keberhasilan Soekarno, Soeharto atau siapapun dalam menemukan titik temu keislaman dengan realitas yang melingkarinya, akan diukur oleh manfaat yang dia bisa berikan kepada masyarakat yang terbanyak. Apapun latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama mereka.

APA BEDA MODERASI AGAMA DAN MODERASI BERAGAMA?

Perbedaannya ada pada awalan *ber* dalam kata 'beragama'. Kedamaian adalah jati diri (*raison d'être*) dari agama karena sifatnya yang komunal. Tidak ada agama yang hanya untuk diri sendiri. Dalam komunalisme akan selalu ada keragaman latar belakang, cita-cita, karakter, kecenderungan, dan kepentingan yang berbeda-beda yang selalu

akan melahirkan ketegangan, bahkan konflik. Agama ada karena kebutuhan manusia untuk terhindar dari konflik itu.

Agama, selain komunal, juga selalu menuntut aktifisme. Karena agama identik dengan nilai dan aturan, maka nilai dan aturan itu harus dipakai dalam kehidupan manusia. Tidak ada agama yang hanya berupa kata-kata dan diam. Agama pasti lebih dari sekedar kata, tetapi ada aksi, ada mimpi, ada perintah, dan ketika itu dilakukan akan selalu ada perbedaan tafsir, pilihan, yang juga bisa menimbulkan konflik. Yang selalu akan diperlukan dalam moderasi itu bukan agama, tetapi beragama. Agama itu, dalam diamnya, dalam katanya, selalu sempurna, dan tanpa masalah. Begitu diartikan bahwa agama untuk manusia, dan manusia pasti memiliki batas dan mimpi, serta keinginan masing-masing, maka akan selalu melahirkan potensi konflik. Bahkan peperangan. Dengan kata lain, begitu masuk ke wilayah manusia, agama

bukan lagi agama, tetapi beragama. Sebuah upaya menjalankan agama. Sebuah proses menemukan atau mewujudkan, atau menyempurnakan agama. Dan dalam penyempurnaan itu kekurangan masing-masing penganutnya akan muncul, dan akan menjadi sumber ketegangan bahkan konflik. Sekali lagi dalam beragama—tidak ada agama, yang ada beragama—selalu diperlukan moderasi. Tanpa moderasi, agama tidak akan pernah bisa berfungsi. Tidak akan pernah bisa dipakai untuk manusia.

bagaimana moderasi beragama dipahami dan diraktekkan. Kelima tujuan itu adalah pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*), pemeliharaan diri (*hifz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan kekayaan (*hifz al-mal*). *Pertama*, moderasi beragama dikembangkan agar keberagamaan kita tidak merusak diri kita sendiri (*hifz al-nafs*).

Diri ini, walaupun milik diri sendiri, tidak bisa juga sepenuhnya dikontrol oleh diri kita. Ada

Dengan kata lain, begitu masuk ke wilayah manusia, agama bukan lagi agama, tetapi beragama. Sebuah upaya menjalankan agama. Sebuah proses menemukan atau mewujudkan, atau menyempurnakan agama.

APA PRINSIP BERAGAMA YANG MODERAT?

Para ulama klasik, terutama al-Ghazali, menegaskan lima tujuan utama diturunkannya ajaran Islam dan tujuan ini bisa dipakai untuk memahami

orang-orang lain yang merasa ikut memilikinya. Ada ibu, bapak, saudara, dan masyarakat. Masing-masing mereka juga punya diri sendiri, tetapi masing-masing mereka juga terhubung dengan orang-orang lain. Keterhubungan yang kadang, bahkan seringkali, ditafsirkan sebagai

miliknya. Begitu orang tua misalnya, merasa kita adalah miliknya, yang bisa dijadikan aset untuk menaikkan harga dirinya atau posisinya dengan keberhasilan menyekolahkan anaknya (misalnya menjadi doktor bahkan professor), atau memberinya modal (baik modal uang maupun modal kolusi atau nepotisme) dan menjadi orang yang sangat kaya, maka hubungan kepemilikan menjadi semakin menguat. Kamu pintar karena saya sekolahkan. Kamu kaya karena saya kasih modal. Artinya, kepemilikan yang dibangun ini, harus dikembalikan, apakah dengan uang (membelikan orang tua rumah), atau dengan menjaga nama baik (jangan sampai kamu jatuh miskin lagi) dan lain-lain. Lalu

apa kaitannya dengan prinsip moderasi beragama untuk diri?

Dengan moderasi, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepemilikan diri (atau otonomi diri) dengan kepemilikan orang lain terhadap diri kita (ikatan keluarga atau sosial). Semata-mata mengklaim diri sebagai milik sendiri tidak baik, menurut orang tua untuk mengatur diri kita (karena merasa memilikinya) juga tidak boleh. Atau masyarakat ikut mengatur segalanya terhadap pikiran dan perasaan kita juga tidak boleh. Dalam diri kita harus ada ruang untuk menemukan titik temu dimana kemerdekaan diri juga dimasuki oleh kepedulian orang tua dan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka masih merasa memiliki.

al-Ghazali, menegaskan lima tujuan utama diturunkannya ajaran Islam (Syariah) dan tujuan ini bisa dipakai untuk memahami bagaimana moderasi beragama dipahami dan dipraktikkan. Kelima tujuan itu adalah pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan diri (*hifz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan kekayaan (*hifz al-mal*).

Perasaan kepemilikan orang tua dan masyarakat itu penting dipelihara agar diri kita tidak terus menyendiri, egois dan kehilangan fungsi sosialnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus selalu juga mengajarkan keluarga dekat dan anggota masyarakat lain tentang pentingnya memberi ruang bagi pertumbuhan diri, siapapun diri orang itu. Entah anggota keluarga (anak, cucu, keponakan, paman) atau saudara sesuku, seiman, senegara). Mereka adalah bukan milik kita. Diri ini milik Allah dan kelak mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan diri yang dititipkannya itu. Tetapi juga sebagai masyarakat, kita harus sadar bahwa diri siapapun akhirnya akan tetap menjadi bagian dari masyarakatnya, dan suka maupun tidak, akan berpengaruh terhadap wajah masyarakat kita. Seorang yang dibiarkan jadi pembunuh besar akan merusak keutuhan masyarakat. Atau pemabuk besar akan merusak masyarakatnya. Sejak awal kita harus memiliki kepedulian pada per-

tumbuhan diri yang menjadi anggota masyarakat kita tanpa terlalu diintervensi sampai mematikan pertumbuhan diri itu. Kepedulian itu bisa dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga yang memang berfungsi menjaga diri masing-masing anggota masyarakat akan bisa menjadi bagian yang baik dari masyarakatnya itu. Ada lembaga pendidikan—yang memang berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai ajaran dan budaya yang ada dalam masyarakat akan terus berjalan dan bertambah baik. Ada juga polisi yang bisa menangkap dan mengirim orang ke penjara sebagai tempat untuk memperbaiki diri. *Corection centre* pusat koreksi dalam bahasa Inggris atau *Lembaga pemasyarakatan* dalam bahasa Indonesia mengisyaratkan fungsi lembaga itu sebagai koreksi diri untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Intinya prinsip moderasi beragama selain menjaga diri, tapi juga menjaga masyarakat sebagai penjaganya. Hanya

moderasi beragama yang bisa saling menjaga diri dan masyarakatnya itu.

Di antara diri di satu sisi dan masyarakat di sisi lain, ada pikiran dan keluarga yang harus juga dijaga melalui moderasi beragama. Akal yang rusak tidak akan pernah bisa menjaga diri apalagi masyarakatnya. Dalam prinsip Lima Tujuan, memelihara akal dan turunan adalah bagian dari yang harus dijaga (*hifz al-aql* dan *hifz al-nasl*). Kemampuan diri masing-masing menjaga dan mengembangkan akal sehat akan sangat penting bagi masa depan masyarakat. Karena itu, kewajiban masyarakat yang utama—melalui lembaga-lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi—adalah meyakinkan dalam berbagai materi dan kurikulumnya serta aturan-aturan yang menjalankannya, bahwa akal sehat akan tumbuh baik. Jangan sampai ada sekolah yang membuat akal sehat anak rusak. Jangan sampai ada masyarakat yang menekan lembaga pendidikan karena merasa bisa ikut serta me-

ngembangkan akal sehat. Yang tahu cara mendidik anak mengembangkan akal sehat itu adalah para pendidik yang memang pekerjaannya memikirkan cara mendidik anak yang terbaik—salah satu hal penting yang harus dipikirkannya adalah menjaga dan menumbuhkan akal agar sehat. Jangan sampai ada kelompok orang yang merasa paling tahu cara menjaga akal sehat itu dan mengintervensi proses pendidikan. Lembaga pendidikan harus dibiarkan mandiri untuk menemukan cara yang terbaik untuk melakukannya.

Jangan sampai pula negara mengintervensi lembaga pendidikan terlalu banyak karena merasa lembaga pendidikan sebagai bagian dari negara. Negara merasa sudah memberikan uang dan fasilitas dan karena itu merasa punya hak penuh untuk mengatur segalanya. Jangan sampai negara turut campur. Sebab, sekali turut campur, kerusakannya akan sangat fatal. Negara memiliki segala sumber daya untuk merusak akal sehat melalui aturan dan

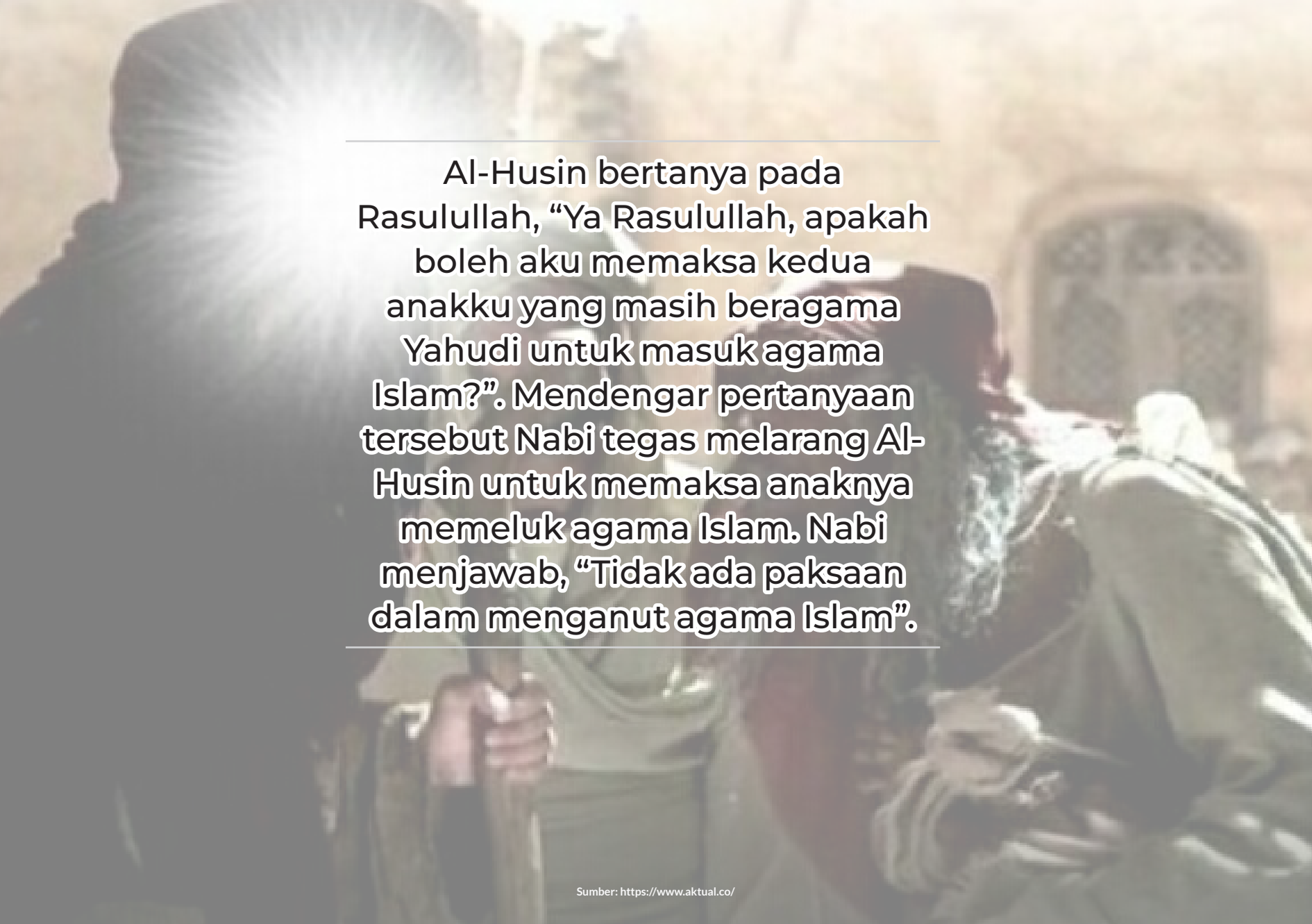
kebijakan yang mengikat semua lembaga pendidikan di negeri ini. Negara bisa mengerahkan semua aparatnya—perangkat desa, kecamatan, kementerian, sampai para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)—untuk menjaga akal sehat atau merusaknya. Negara yang merusak adalah negara yang sangat destruktif pada akal sehat. Apalagi kalau yang melakukannya adalah kepala negara. Dalam sistem presidensial, presiden adalah orang yang paling kuat di negeri ini. Yang setiap pikiran, sikap dan perbuatannya akan menentukan arah negeri ini. Apakah akan mengarah kepada kebaikan rakyat atau kepada keburukan. Presiden yang memiliki defisit akal sehat, di negara manapun, kapanpun, akan berakhir dengan nestapa rakyatnya di masa depan.

Sebagai kesimpulan, prinsip beragama yang moderat. *Pertama*, adalah toleran dan tidak memaksakan kehendak. Rasulullah diutus dengan membawa ajaran agama Islam yang toleran ter-

hadap yang berbeda. *Kedua*, tidak melakukan kekerasan saat memutuskan sebuah persengketaan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama dan tidak boleh memberontak.

APA CONTOH MODERASI BERAGAMA YANG DICONTOHKAN RASULLULLAH?

Suatu ketika sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam bernama Al-Husin bertanya pada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apakah boleh aku memaksa kedua anakku yang masih beragama Yahudi untuk masuk agama Islam?”. Mendengar pertanyaan tersebut Nabi tegas melarang Al-Husin untuk memaksa anaknya memeluk agama Islam. Nabi menjawab, “Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam”. Peristiwa inilah yang menurut tafsir Al-Qurthubi menjadi sebab turunnya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

A historical scene with a man in a white turban and a man in a red tunic. The man in the white turban is on the left, and the man in the red tunic is on the right. They are both looking towards the center. The background is a bright, hazy outdoor setting. The text is overlaid on the scene, centered in the upper half.

Al-Husin bertanya pada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apakah boleh aku memaksa kedua anakku yang masih beragama Yahudi untuk masuk agama Islam?”. Mendengar pertanyaan tersebut Nabi tegas melarang Al-Husin untuk memaksa anaknya memeluk agama Islam. Nabi menjawab, “Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam”.

BAB 2 | MELAWAN EKSTREMISME DENGAN MODERASI BERAGAMA

Ekstremisme beragama menjadi pembicaraan banyak kalangan, terutama semenjak peristiwa 9/11. Dia sering dipertalikan dengan aksi terorisme. Lalu, apa hubungannya dengan moderasi beragama? Sebagai sebuah upaya menjaga diri untuk selalu berada di titik tengah yang mempertemukan titik-titik ekstrem, salah satunya terorisme. Bagian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu.

APAKAH MODERASI BERAGAMA MENJADI JALAN KELUAR EKSTREMISME?

Anti kekerasan, atau dalam bahasa Arab *al-mudādd lil-‘unf*, berarti menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik diri (*nafs*) ataupun tatanan sosial. Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk perubahan pada sistem sosial dan politik.

Ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memaksakan kehendak yang sering kali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat.

Cara seperti ini juga tak lepas dari aksi-aksi kekerasan atau ekstrem melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Tentunya, cara-cara ekstrem ini bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk Islam. Upaya menolak kekerasan bukan hanya kewajiban seorang beragama, tapi juga kewajiban bagi seorang warga negara yang baik. Secara tegas, dalam Qur'an dijelaskan bahwa cara terbaik mendakwahkan Islam adalah dengan rahmat dan penuh kasih sayang terhadap sesama, bukan dengan kekerasan dan pemaksaan keras hati. Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (Q.S. Ali Imran: 159).

Bebas dari kekerasan atau anti kekerasan berarti menolak paham dan perilaku ekstrem (ekstremisme) yang mengajak pada perusakan, baik pada diri sendiri maupun tatanan sosial. Paham keagamaan yang ekstrem dapat juga dimaknai sebagai cara berpikir tertutup dan sempit serta berupaya melakukan pemaksaan kehendak. Pemaksaan yang dilakukan sering kali bertentangan dengan norma dan kesepakatan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, sikap memaksakan orang lain dengan disertai ancaman untuk melakukan atau mengenakan atribut yang sama dengan yang sedang digunakan merupakan sikap ekstrem.

Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk perubahan pada sistem sosial dan politik. Ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memaksakan kehendak yang sering kali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat.

Padahal, apa yang dipaksakan dengan disertai ancaman tersebut masih berada dalam ruang wacana fikih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Dengan demikian, orang yang anti kekerasan memiliki ciri memprioritaskan jalan damai dalam mengatasi masalah, mengutamakan musyawarah, menyerahkan permasalahan kepada pihak yang berwajib, serta tidak main hakim sendiri.

KENAPA PENDIDIKAN DAPAT MENJADI CELAH EKSTREMISME?

Tidak ada faktor tunggal dalam menjelaskan mengapa seseorang dapat terlibat dalam kegiatan ekstremisme. Penyebab ekstremisme pada seseorang merupakan kombinasi dari berbagai faktor seperti sosio-ekonomi, psikologis, dan faktor

pendidikan. Dan dalam beberapa studi ditemukan bahwa faktor pendidikan dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk melakukan kegiatan ekstremisme, meskipun pengaruhnya berupa pengaruh tidak langsung.

Penjelasan sederhananya adalah bahwa pendidikan dapat membentuk keterampilan dan kesempatan ekonomi seseorang untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan dengan semakin sejahteranya seseorang secara ekonomi, maka dapat menurunkan peluang orang tersebut terlibat dalam kegiatan ekstremisme. Hal inilah yang menyebabkan kenapa faktor pendidikan yang kurang berkualitas dapat menjadi celah masuknya ekstremisme. Di negara-negara yang memiliki pendidikan yang buruk dan kurang merata, ditemukan bah-

wa radikalisme dan ekstremisme dapat tumbuh dengan subur (Novikov & Koshkin, 2019). Dalam studi Danzell et al. (2018) ditemukan juga bahwa semakin terdidik sebuah masyarakat, maka akan semakin kurang masyarakat tersebut terkait dengan aksi teror ataupun ekstremisme.

umat Islam menggunakan jihad sebagai dalih dalam melancarkan aksi teror dan kekerasan. Sehingga jihad kemudian identik dengan terorisme. Pemahaman yang sempit akan jihad bukan hanya mereduksi ajaran Islam tetapi juga mengundang stigma negatif pada umat Islam. Maka kita perlu

Dalam studi Danzell et al. (2018) ditemukan juga bahwa semakin terdidik sebuah masyarakat, maka akan semakin kurang masyarakat tersebut terkait dengan aksi teror ataupun ekstremisme

JIHAD YANG BAIK SEPERTI APA?

Sebelum melihat jihad yang baik seperti apa, ada baiknya kita mencoba memahami hakikat jihad yang sebenarnya. Kata jihad sering disorot media karena sering dikaitkan dengan kekerasan dan gerakan terorisme. Memang jihad merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Namun pemahaman dan pengamalannya telah mengalami banyak pergeseran. Beberapa kelompok dalam

memahami sejatinya makna jihad sesuai dengan konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara bahasa, kata jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti mengeluarkan segenap tenaga untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa berakar dari kata *jahd* yang berarti kesukaran yang harus diatasi dengan sangat sungguh-sungguh. Dengan kata lain, jihad secara bahasa bermakna kerja keras, bersungguh-sungguh, mengerahkan seluruh kemampuan demi mencapai tujuan yang mulia. Di

dalam Qur'an, jihad disebutkan 41 kali. Penyebutan berbagai variasi kata jihad lebih menunjukkan makna perjuangan yang membuat manusia harus mengerahkan segenap kemampuan demi tujuan yang mulia. Jihad bermakna tersebut lebih banyak dibandingkan jihad yang bermakna perang. Jadi penggunaan kata jihad untuk membenarkan kekerasan merupakan perbuatan yang tak berdasar dan dapat membahayakan umat Islam.

Jihad yang baik dan benar tidak dimaknai dengan memerangi apalagi dengan kekerasan melainkan dengan berusaha keras untuk mengalahkan nafsu setan dalam diri manusia. Sebagai muslim yang baik, musuh terbesar yang harus diperangi adalah nafsu dalam diri. Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang merupakan bentuk jihad umat Islam. Hal ini dilakukan demi menjaga agama. Memang jihad se-

ring dimaknai dengan peperangan. Jihad dengan perang memang boleh dilakukan, tapi hanya jika untuk membela diri atau ada penyerangan secara terang-terangan kepada umat Islam. Dalam sejarah Islam, peperangan terjadi bukan dilakukan untuk membunuh non-muslim semata atau membasmi yang berbeda keyakinan dengan muslim seperti yang dilakukan kaum teroris, tapi untuk mengantisipasi serangan yang dilancarkan pihak musuh. Namun dalam konteks negara Indonesia yang damai dan harmonis, tentu saja tidak ada keniscayaan untuk mengangkat senjata dan berperang. Dalam situasi damai, jihad diwujudkan dengan melakukan amal shalih sesuai kemampuan diri. Jika mampu, seorang muslim dapat menuaikan haji atau berderma pada kaum fakir miskin. muslim juga dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, lingkungan sekitar dan diri

Jihad yang baik dan benar tidak dimaknai dengan memerangi apalagi dengan kekerasan melainkan dengan berusaha keras untuk mengalahkan nafsu setan dalam diri manusia.

sendiri. Maka tindakan kekerasan atau menyebarkan teror tidak dibenarkan karena dapat melukai orang lain dan lingkungan sekitar. Apalagi jika dilakukan dengan melakukan bunuh diri, maka selain menanggung dosa bunuh diri, ia juga melukai diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Dalam situasi perdamaian, makna jihad menjadi sangat luas meliputi semua usaha muslim dalam mewujudkan kebaikan baik itu dalam bidang spiritual, ekonomi, politik, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya. Sangat tidak tepat memaknai jihad dengan melakukan kekerasan ketika jihad yang sebenarnya adalah dengan memerangi ego dalam diri untuk menjalankan kebaikan. Jika seseorang rajin melakukan ibadah, maka ia bisa dinamakan sebagai seorang mujahid. Berbakti pada kedua orang tua juga merupakan jihad. Berdakwah atau menjalankan tugas pendidik sebagai guru juga merupakan jihad. Jihad yang sesungguhnya adalah menebarkan kebaikan dan meng-

amalkan nilai-nilai universal dalam ajaran agama Islam yang penuh rahmat untuk kebaikan semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Jihad tidak sama dengan perang. Pemahaman yang lebih mendalam pada teks Qur'an dan Hadits akan memperjelas makna jihad yang luas. Kesalehan, iman, dan Islam seseorang merupakan jihad yang baik dan harus dilakukan oleh muslim yang baik.

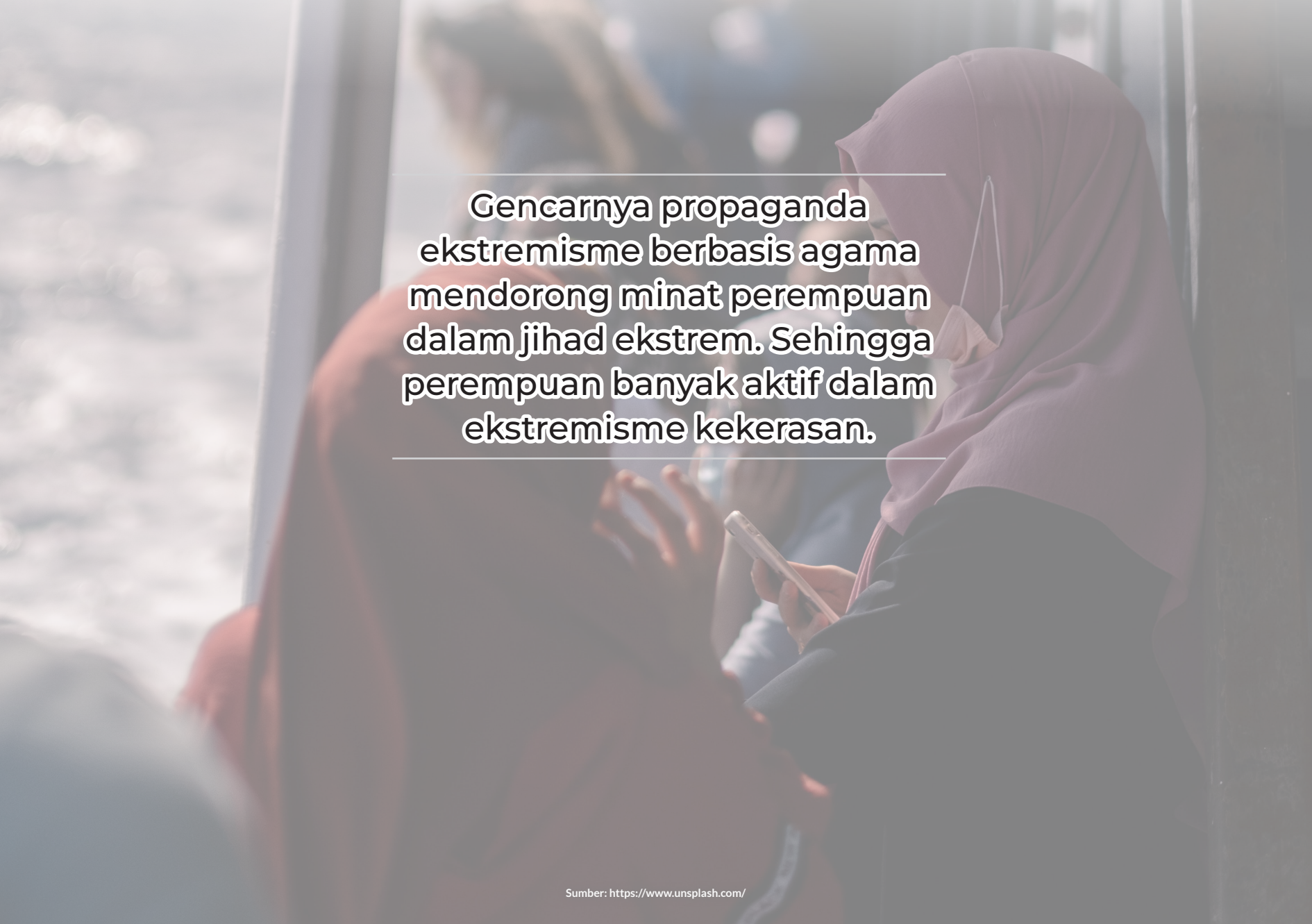
MENGAPA PEREMPUAN AKTIF IKUT MENGIKUTI JIHAD EKSTREM?

Setiap orang berpotensi menjadi target paparan ekstremisme tanpa memandang jenis kelamin, suku, budaya, agama, dan usia maupun latar belakang pendidikan. Ideologi kekerasan berbasis agama merupakan virus yang dapat melanda siapa saja jika didukung berbagai faktor, situasi, dan juga kondisi. Namun belakangan, perempuan banyak yang terlibat aksi ekstremisme. Sebelumnya, perempuan tidak banyak terlibat karena dalam masyarakat ia diposisikan di bawah kepemimpinan

laki-laki dan cenderung aktif hanya pada wilayah domestik (memasak di dapur, mengurus anak, dan melayani suami). Aksi terorisme lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari serangan Bom Bali hingga Kampung Melayu. Tetapi pada tren kekerasan ekstremisme terbaru, perempuan bukan bergerak sebagai pendamping suami saja tapi juga ikut andil dalam penyebaran ideologi, perekrutan, hingga aksi kekerasan. Partisipasi aktif perempuan dalam aksi ekstremisme memang menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Tidak hanya aktif sebagai pelaku tindakan jihad ekstrem, perempuan juga banyak dimanfaatkan dalam perannya sebagai ibu untuk menyebarkan pemahaman ekstrem kepada anak-anak yang di kemudian hari diharapkan menjadi pelaku ekstremisme. Mereka juga banyak dimanfaatkan sebagai corong penyebaran ideologi ekstrem baik luring maupun daring.

Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan menimbulkan

pertanyaan tentang mengapa dan apa sebenarnya yang membuat mereka aktif dalam mengikuti jihad ekstrem. Tentu saja jawabannya tidak sederhana. Banyak faktor yang bisa mendorong perempuan tertarik dengan gerakan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Beberapa di antara yang sering disebutkan sebagai motivasi utama adalah kombinasi antara faktor agama, sosial dan budaya yang membuat perempuan merasa terpinggirkan dan kemudian mendorong mereka memasuki jalan ekstremisme. Aspek ekonomi dan politik seperti ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi turut menjadi dorongan kuat untuk melakukan aksi kekerasan. Faktor ideologi juga berperan penting sebagai motivasi penggerak. Gencarnya propaganda ekstremisme berbasis agama mendorong minat perempuan dalam jihad ekstrem. Sehingga perempuan banyak aktif dalam ekstremisme kekerasan.

A woman wearing a purple hijab and a white face mask is seated on a boat, looking down at her smartphone. The background shows the water and the boat's structure, with a soft, slightly blurred light effect. The text is overlaid on the image, framed by two horizontal lines.

Gencarnya propaganda
ekstremisme berbasis agama
mendorong minat perempuan
dalam jihad ekstrem. Sehingga
perempuan banyak aktif dalam
ekstremisme kekerasan.

Ditambah lagi proses rekrutmen kelompok ekstremis yang menitikberatkan aspek afektif yang dalam masyarakat kita dikonstruksi dekat dengan perempuan. Emosi, empati dan rasa kepedulian dilekatkan dengan perempuan. Hal ini membuat perempuan lebih rentan terpapar pandangan ekstremisme. Kelompok intoleran pada umumnya menggunakan manipulasi emosi dengan memanfaatkan kondisi ekonomi dan politik yang masih jauh dari sempurna. Dengan merujuk pada ketidakadilan, ketertindasan dan kesenjangan di bawah pemerintah, perempuan rawan terba-
wa pada arus pemikiran kelompok ekstremis yang dianggap menawarkan solusi terbaik. Empati yang sudah tersulut karena kondisi bangsa memperkuat motivasi untuk menempuh jalan ekstremitas. Selain itu, faktor sosial juga berperan pada mening-
katnya perempuan yang aktif di jalur ekstrem.

Budaya patriarki dan relasi sosial yang menomorduakan perempuan membuat mereka menca-
ri bentuk kesetaraan melalui ekstremisme. Dalam masyarakat yang menerapkan budaya patriarkis, perempuan seringkali terpinggirkan. Laki-laki le-
bih banyak aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Meski partisipasi perempuan juga tidak dilarang, ruang geraknya banyak dibatasi hanya pada wi-
layah domestik saja. Wilayah publik lebih banyak menjadi domain utama laki-laki. Sehingga pe-
rempuan mencari kesetaraan dengan mengikuti kelompok ekstrem yang memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat aktif dalam peran yang se-
belumnya secara eksklusif dipegang laki-laki. Par-
tisipasi aktif mereka dalam gerakan ekstremisme merupakan pembuktian akan eksistensi mereka yang sebelumnya kurang diakui atau relatif tidak dianggap penting.

Budaya patriarki dan relasi sosial yang menomorduakan perempuan membuat mereka mencari bentuk kesetaraan melalui ekstremisme.

BAB 3 | MODERASI BERAGAMA UNTUK SEMUA

Ada anggapan bahwa moderasi beragama hanya berlaku untuk orang Islam saja. Itu anggapan yang keliru. Dalam bagian ini, kita akan menemukan jawaban-jawaban bahwa moderasi beragama sejatinya untuk semua orang yang ada di Indonesia.

APAKAH MODERASI BERAGAMA HANYA UNTUK ORANG ISLAM?

Moderasi beragama bukan hanya untuk orang Islam. Selama ini, ada kesan bahwa moderasi beragama terkesan menyudutkan umat Islam misalnya

saja dengan menjauhkan muslim dengan syariah, diksi “Tuhan” yang dipilih daripada “Allah” dalam buku moderasi beragama, ataupun mengerdilkan keimanan dan ketaatan seorang muslim yang menjalankan Islam sepenuh hati. Pandangan semacam ini jelas adalah prasangka.

Paling awal sekali, perlu diketahui bahwa moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama, kemudian menjadi salah satu program utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bukanlah ditujukan hanya kepada orang Islam di Indonesia. Sebagai se-

buah kebijakan nasional, jelas moderasi beragama ditujukan bagi siapapun yang ada di Indonesia. Ia diinisiasi untuk mengingatkan manusia-manusia Indonesia agar saling menghormati dan bertenggang rasa terhadap aspirasi beragama setiap orang. Baik mayoritas maupun minoritas agama yang ada di Indonesia wajib mengaplikasikannya sebagai cara pandang.

Lalu, karena ditujukan untuk semua agama, maka tidak mengherankan bila diksi yang dipilih adalah diksi yang dapat diterima oleh semua agama. Kata Tuhan memang tidak cocok untuk beberapa agama seperti muslim, Hindu, maupun Buddha. Namun, Tuhan sebagai sebuah konsep “Yang Maha Ada”, “Yang Maha Kuasa”, “Yang Maha Pencipta”, dan “Yang Maha Apapun” bisa diterima oleh banyak umat beragama. Kata Tuhan tidak didudukkan sebagai sebuah “nama”, melainkan kata yang merepresentasikan imajinasi kita terhadap “Yang Maha Apapun” itu. Sehingga, sekali lagi, ti-

dak ada upaya merudung keyakinan seseorang dalam kebijakan moderasi beragama. Bahkan dalam Pancasila sila pertama, para pendiri bangsa kita sepakat untuk menggunakan kata “Tuhan”.

Sebagai sebuah kebijakan, moderasi beragama pun dimaknai oleh setiap agama. Untuk kasus Islam sudah dibahas panjang dalam buku tanya jawab ini. Sementara untuk kasus agama lain, ada jalan yang mereka tempuh menggunakan bahasa agama mereka masing-masing untuk memaknai moderasi beragama sebagai bahasa universal. Moderasi beragama bak jalan sekaligus tujuan, bukannya kandang yang memagari umat beragama dalam mengekspresikan keagamaannya. Sebab, secara esensial, orang yang mengaplikasikan keagamaannya secara hakiki, maka sudah seharusnya mengaplikasikan moderasi beragama. Tentu ini tidak dilihat sebagai pengkerdilan keyakinan. Moderasi beragama adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dalam beragama. Nabi Muhammad, Nabi

Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi lain juga menjadi contoh akan praktik kebijaksanaan yang dihasilkan oleh pengaplikasian moderasi beragama, sebagaimana dijelaskan panjang lebar pada buku Akar Persoalan Kebangsaan: Jawaban Moderasi Beragama (2021).

Sekarang, mari kita tengok bagaimana moderasi beragama dimaknai dan diaplikasikan oleh agama-agama selain Islam, terutama untuk memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukanlah kebijakan sempit untuk “membasmi” keyakinan orang Islam di Indonesia. Semua agama juga merasakan hal sama, sebagaimana yang dialami Islam, ketika kebijakan ini didengungkan oleh negara. Pertanyaan paling sering diajukan kepada pemim-

pin agama adalah “apakah moderasi beragama ada dasarnya dalam kitab suci?”. Ini menjadi cerminan bahwa kebijakan ini tidak menjerumuskan salah satu cara beragama saja di Indonesia, tapi untuk semua sikap beragama di setiap agama yang ada di Indonesia. Pengalaman Kristen, sebagaimana dijelaskan oleh Pdt. DR. Ronny Mandang, MTh. (2021), memberikan signifikansi bahwa, “moderasi beragama dimulai dari ucapan Tuhan Yesus tentang hukum utama yang pertama tentang kasih dan hukum kedua yang tertera dalam Alkitab (Mat 22:39): ‘kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’”. Ia melanjutkan bahwa dalam ajaran Kristen, siapapun yang disebut sesama, sekalipun suku, warna kulit, status sosial, dan agama-

Sebagai sebuah kebijakan nasional, jelas moderasi beragama ditujukan bagi siapapun yang ada di Indonesia. Ia diinisiasi untuk mengingatkan manusia-manusia Indonesia agar saling menghormati dan bertenggang rasa terhadap aspirasi beragama setiap orang. Baik mayoritas maupun minoritas agama yang ada di Indonesia wajib mengaplikasikannya sebagai cara pandang.

nya berbeda, harus selalu dikasihi sekalipun tidak kenal. Sehingga, Pendeta Ronny menyimpulkan bahwa moderasi beragama dari perspektif Kristen adalah kasih yang terpancar dan bergerak ke arah luar tanpa syarat dan kepada siapapun.

Pada pengalaman Katolik, menurut tuturan Kepala Seksi Pendidikan Katolik Kantor Kementan Ende, Agnellus Jaya (2021), moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Katolik yang dipahami oleh sebagian umatnya. Menurutnya, salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama di lingkungan Katolik adalah dengan melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama lain, dan aliran satu dengan aliran lain dalam internal umat beragama. Ia menyadur kisah dari Alkitab tentang juru damai, Yesus Kristus, yang dalam ajarannya tidak mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Justru, hampir semua ayat mengajar-

kan cita-cita dan harapan untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kebenaran di muka bumi ini. Apa yang disampaikan oleh Agnellus Jaya ini juga menjadi bagian gerakan global Katolik. Ia melanjutkan bahwa, “Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah *Nostra Aetate* (NA). Dekrit ini secara khusus berbicara hubungan gereja dengan agama-agama lain yang bukan Kristen. Gereja Katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama itu serba benar dan suci.”

Semangat pemimpin umat beragama di kalangan Hindu juga sama. Moderasi beragama diposisikan sebagai “lingkir pin”, yakni penengah dalam suatu persoalan khususnya dalam lingkup beragama. Menurut I Nengah Wirta Darmayana (2021), Hindu merupakan agama spiritual sehingga sangat mudah ditemui ajaran, sloka, maupun mantram yang berkaitan dengan nilai-nilai esen-

sial dalam moderasi beragama. Darmayana misalnya menyadur Atharvaveda XII.1.4.5:

“Janam Bbhrati bahudha vivacasam, Nanadharmanam prthivi jathaukasam Sahasram dhara dravinasya me duham, Dhuruveva dhe-nur anapas phuranti.”

(Bumi Pertiwi yang memikul beban, bagaikan sebuah keluarga, semua orang berbicara dengan bahasa yg berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yg berbeda, semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita tumbuh penghargaan di antara kita).

I Nengah Wardayana melanjutkan bahwa untuk mengaktualisasikan moderasi beragama dibutuhkan empat pilar yang mendasarinya. *Pertama*, Widya atau kecerdasan, baik kecerdasan Intelektual, sosial, maupun spiritual. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, akan semakin mudah dalam mengelola suatu perbedaan.

Kedua, Maitri atau cinta kasih. Kedewasaan seseorang dalam mengelola perbedaan tentunya didasari rasa cinta kasih kepada siapa saja, karena dalam Hindu mengenal Wasudewam Kutumbhakam (kita semua adalah bersaudara). Ini memposisikan semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Sebab, manusia pada hakikatnya bersumber dari satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Begitu pula dengan ajaran Tat Wam Asi.

Ketiga, Ahimsa, yaitu kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti. Dalam mengembangkan sikap ini, dibutuhkan kemampuan sikap untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, dan menganggap agama kita paling benar lalu boleh melakukan kekerasan bahkan membunuh terhadap orang lain yang tidak sepaham.

Keempat, apabila kita mampu untuk mengendalikan kemampuan tersebut, maka akan tercipta suasana yang Santhi. Yaitu, kehidupan yang senan-

tiasa damai, baik kedamaian intern umat beragama, antar umat beragama, dan damai bersama pemerintah. Apabila setiap umat beragama memiliki empat kemampuan tersebut, niscaya kehidupan yang penuh kedamaian, toleran dan moderat akan tercapai.

Di Buddha, ada sebuah ajaran yang disebut dengan Ariya Atthagika Magga atau jalan mulia berunsur delapan. Menurut Widya Dharmma Palla (2021), dari delapan ini dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu kelompok 'sila' yang terdiri dari perbuatan benar, ucapan benar dan mata pencaharian benar. Kelompok kedua yaitu 'samadhi' yang terdiri dari konsentrasi benar, usaha benar dan daya upaya benar. Kelompok ketiga yaitu 'panna' yang terdiri dari pikiran benar dan pandangan benar. Jika dipraktikkan dengan baik dan benar tidak akan menimbulkan pertentangan dalam diri sendiri maupun orang lain.

Bagi Dharmma Palla, analogi sederhana dari moderasi beragama bisa diumpamakan dalam hal makan. Jika seseorang memakan makanan secara berlebihan maka akan menimbulkan rasa sakit karena tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, demikian juga sebaliknya jika seseorang mengkonsumsi makanan yang terlampau sedikit, maka akan timbul penyakit sebagai akibat makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh itu sendiri. Makanan sesungguhnya dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menunjang keberlangsung hidup. Perenungan dalam hal makan ini terdapat dalam *Majjhima Nikaya* ayat 39:

"... yavadeva imassa kayassa thitiya yapanaya vihim suparatiya brahmacariyanuggahaya, iti purananca vedanam patihankhami navanca vedanam na uppadesami ..."

(memakan makanan hanya untuk kelangsungan dan menopang tubuh ini, untuk menghentikan rasa tidak enak (karena lapar) dan untuk

membantu kehidupan suci. Saya akan menghilangkan perasaan sakit yang lama dan tidak akan menimbulkan perasaan sakit yang baru karena makan berlebih-lebihan).

Kaitannya dengan moderasi beragama bahwasanya mempelajari ajaran agama jangan hanya terbatas pada teks dengan mengabaikan konteks. Demikian juga sebaliknya, tidak mengutamakan konteks tapi tidak memperhatikan teks. Tetapi tekstual dan kontekstual yang dipraktikkan secara bersamaan. Teks yang dimaksud adalah memahami ajaran agama pada ilmu pengetahuan, sedangkan konteks dalam hal pemahaman ajaran agama masuk akal pada pemahaman masing-masing orang.

Kemudian terakhir, pada pengalaman Konghuchu, sebagaimana dijelaskan oleh Ws. Liem Liliany Lontoh (2021), bahwa kepada salah seorang murid, Nabi Kongzi memberitahu bahwa Jalan Suci-Nya hanya satu tapi menembusi semuanya. Menurutnya, pokok ajaran agama Khonghuchu

adalah Satya dan Tepasalira, yakni: “Satya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan firman yang diemban kepada kita dalam kehidupan ini, menegakkan dan menggemilangkan kebajikan dan tenggang rasa”.

Liliany melanjutkan ayat tersebut mengindikasikan bahwa mencintai terhadap sesama manusia, sesama makhluk, dan lingkungan hidupnya adalah pesan baik yang ditinggalkan oleh Nabi Kongzi. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ajaran Kongzi universal, tidak terbatas pada satu bangsa atau satu negara tertentu tapi bagi semua orang dan segala jaman sebagaimana telah dinyatakan oleh banyak orang yang sudah mempelajarinya dengan seksama. “Di empat penjuru lautan semuanya saudara” (Lun Yu XII:5) mengandung seruan atau ajakan kepada semua orang, semua bangsa-bangsa dimuka bumi ini agar berusaha mencapai kerukunan nasional dan keseduniaan. Dalam pandangan Nabi Kongzi yang lain, “apa yang

diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain” (Lunyu Jilid VI:30,3).

Sehingga, jelas bahwa moderasi beragama di Indonesia bukanlah kebijakan eksklusif. Ia adalah kebijakan inklusif untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif pula. Bukan berarti moderasi beragama juga mencampur-campur agama. Salah besar memaknai moderasi beragama seperti ini. Sehingga sekali lagi ditekankan bahwa moderasi beragama berlaku bagi setiap umat beragama yang eksis di Indonesia.

APAKAH ARTI TOLERANSI MENURUT MODERASI BERAGAMA?

Toleransi, atau *at-tasāmuh* dalam bahasa Arab, memiliki arti sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan

... mempelajari ajaran agama jangan hanya terbatas pada teks dengan mengabaikan konteks. Demikian juga sebaliknya, tidak mengutamakan konteks tapi tidak memperhatikan teks. Tetapi tekstual dan kontekstual yang dipraktikkan secara bersamaan. Teks yang dimaksud adalah memahami ajaran agama pada ilmu pengetahuan, sedangkan konteks dalam hal pemahaman ajaran agama masuk akal pada pemahaman masing-masing orang.

Toleransi, atau *at-tasāmuḥ* dalam Bahasa Arab, memiliki arti sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini.

sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Bagaimana cara menyikapi perbedaan agama dan keyakinan telah tegas ditunjukkan dalam Qur'an. Selain tidak boleh saling menghina sesama agama lain, juga dinyatakan bahwa masalah perbedaan agama tidak perlu dijadikan sebagai benih konflik. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing, terlebih dalam bingkai merawat kemajemukan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya, hidup damai sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama telah ditegaskan dalam

Qur'an, yang artinya, "*Untukmu agamamu, untukku agamaku*" (Q.S. Al-Kafirun:6).

APA YANG DIHARAPKAN DARI ORANG YANG MEMILIKI PANDANGAN MODERASI BERAGAMA DAN SIKAP TOLERAN?

Dalam bahasa Islam yang harus dilakukan adalah menjaga dan memperkuat silaturahmi. Menjaga dan memperkuat keterhubungan dengan sesama anggota masyarakat yang ada di negeri ini apapun latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun agama. Keterhubungan hanya bisa diperkuat jika bisa melampaui batas-batas keterhubungan fisik yang ada di permukaan. Keterhubungan yang paling dalam akan membuat hubungan-hubungan sosial, politik, ekonomi, dan

budaya kita lebih fleksibel karena mengakar di kedalaman dan keluasan Islam. Kedalaman hubungan tentu saja meniscayakan dialog Islam dan sistem sosial, politik, ekonomi yang menjadi akar terdalam dari struktur yang membangunnya. Dialog di kedalaman dan keluasan dengan masing-masing sistem (misalnya demokrasi sekuler, kapitalisme sekuler dan sosialisme atheis) akan melahirkan titik temu moderasi agama yang kuat dan awet, melampaui keterbatasan kemanusiaan kita saat ini, sehingga ke depan, walaupun generasi berikutnya bertambah luas atau bertambah sempit, rumusan moderasi akan tetap bertahan. Paling tidak akan menjadi rujukan baik tentang bagaimana menemukan titik temu baru di antara kontestasi yang sangat kompleks pada zamannya.

Kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa, karena berasal dari Dzat Yang Maha Luas dan Maha Tak Terbatas, Islam itu adalah keluasan dan kedalaman sistem apapun yang tak ada duanya di dunia

ini, maka sistem apapun di luar Islam akan selalu menemukan tempatnya yang terbaik di dalam Islam. Tidak akan ada tubrukan, karena tubrukan hanya ada di wilayah sempit. Kalau Islam kita lebih sempit, atau paling tidak sama luas dan dalamnya dengan sistem yang ada di luar Islam, maka konflik akan terus menerus terjadi. Masing-masing akan melihat dirinya paling luas. Kesamaan luas tidak akan pernah bisa memasukkan realitas di luar Islam ke dalam Islam dan, walaupun dipaksa, akan ada orang atau kelompok yang menjadi pengikut sistem yang tengah berhadapan dengan Islam tersinggung atau marah. Karena mereka harus dicecilkan agar masuk ke kesempitan Islam yang kita punya. Sekali lagi keluasan tidak akan pernah bisa menyakiti orang karena dalam keluasan akan ada pertumbuhan yang sesungguhnya diinginkan oleh semua orang. Termasuk orang-orang yang ada di dalam sistem sosial, politik, ekonomi atau budaya tertentu di luar Islam.

Kalau toleransi hanya bisa dilakukan oleh orang yang Islamnya seluas ajaran Islam yang ada dalam Dzat-Nya, maka supaya lebih toleran, seorang muslim harus selalu memperluas ajaran Islam yang diyakininya. Bagi yang toleransinya masih rendah, yaitu orang-orang yang melihat pertemuan dengan keyakinan lain sebagai ancaman yang akan memakan keyakinannya, maka solusinya adalah kesungguhan belajar. Kesungguhan itulah yang dimaknai sebagai Jihad yang sebenarnya. Berjihad untuk Islam dilakukan dengan cara belajar sebaik-baiknya, seluas-luasnya, sehingga tidak ada lagi orang atau keyakinan yang bisa mengancamnya. Bagi musuh-musuh Islam, termasuk para plutokrasi dan oligarki, yang melihat Islam sebagai ancaman terbesarnya bagi keserakahan kekuasaan ekonomi dan politiknya,

orang-orang toleran adalah musuh terbesarnya. Orang-orang toleran, dengan keluasan dan kedalaman ajarannya, tidak bisa dimatikan. Tidak bisa ditakut-takuti dan diancam mati. Ibarat kedalaman lautan, tidak ada kolam kecil yang bisa mengancamnya. Apalagi mematikannya.

Moderasi beragama adalah kunci wujud toleransi. Toleransi bukan menghilangkan jati diri dan berubah menjadi orang lain yang ditolerirnya. Mematikan jati diri dan orang lain bukan solusi beragama. Agar tidak mati, jati diri harus selalu tumbuh dan pertumbuhan hanya terjadi melalui keterhubungan yang tidak saling mematikan. Karena harus saling menumbuhkan, para pemeluk agama—atau para pengikut aliran keyakinan apapun, baik yang berasal dari bumi maupun dari langit—harus selalu terbuka dan kritis. Kritik yang

Bagi yang toleransinya masih rendah, yaitu orang-orang yang melihat pertemuan dengan keyakinan lain sebagai ancaman yang akan memakan keyakinannya, maka solusinya adalah kesungguhan belajar.

Moderasi beragama adalah kunci wujud toleransi. Toleransi bukan menghilangkan jati diri dan berubah menjadi orang lain yang ditolerirnya.

paling pedas harus tetap dihadapi karena semakin pedas kritik semakin menumbuhkan jika keyakinannya terhubung dengan keluasan dan kedalaman DzatNya. Hanya kebenaran yang terisolasi, atau yang terhubung dengan kedangkalan, yang takut pada kritik. Di keluasan semua kritik bertemu. Titik temu yang tidak mungkin dibangun melalui ekstremisme. Baik ekstrem kiri, kanan, depan, belakang, atas ataupun bawah. Hanya moderasi beragama yang bisa menghindari kita dari segala jenis ekstremisme.

BOLEHKAH MENGKAFIRKAN SESAMA MUSLIM?

Mengkafirkan sesama muslim hukumnya haram dan membahayakan kehidupan sosial. Dari sudut pandang syariat Islam, menuding muslim sebagai kafir merupakan perbuatan dosa yang

berbahaya, bahkan bisa mengena diri si penuduh itu sendiri. Berkaitan itu, Nabi Muhammad mengatakan bahwa, "Siapa yang mengkafirkan orang mukmin yang lain, maka dia sendiri yang kafir." Sabda Nabi Muhammad tersebut menunjukkan bawa tudingan kafir merupakan perbuatan yang berat dosanya karena bisa mengakibatkan pelakunya menjadi kafir. Oleh karena itu, di tengah masyarakat yang plural, berbaik sangka kepada orang lain harus dikedepankan.

Perilaku seperti melabeli kafir kepada non-muslim saja baiknya dihindari apalagi kepada saudara sesama muslim. Pengkafiran merupakan perbuatan yang eksklusif dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang inklusif. Islam adalah agama yang menjunjung asas *rahmatan lil `alamin* alias rahmat bagi seluruh alam. Ini tentu saja berlaku buat semuanya, baik sesama muslim, sesama ma-

nesia, sesama penduduk bumi dan lain sebagainya. Mengkafirkan apalagi kepada saudaranya seiman menunjukkan pengingkaran pada nilai kemanusiaan dan perdamaian yang sarat dalam ajaran Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan umatnya untuk menyebarkan kebaikan terhadap sesama. Bahkan dicontohkan di dalam Qur'an bagaimana para nabi terdahulu menyebarkan agama melalui cara yang santun dan menghindari cacik maki. Apalagi kepada sesama muslim yang diikat dalam persaudaraan Islam. Tentu saja hanya kebaikan yang patut dibagikan kepada saudara bukan hinaan apalagi label kafir yang sering dijadikan cacik maki. Memberikan label kafir menyalahi prinsip kebaikan Islam juga mendahului Allah. Yang berhak menentukan kadar keimanan seseorang bukanlah manusia, tetapi Allah yang Maha Mengetahui semua makhluknya. Manusia yang pengetahuannya hanya sangat sedikit tidak berhak menghakimi keimanan orang lain

apalagi saudaranya yang seiman. Muslim yang baik harus selalu menanamkan nilai saling menghormati dalam dirinya. Karena hanya Allah yang tahu hakikat keimanan seseorang, manusia yang serba terbatas perlu berprasangka baik dengan berperilaku baik dan tidak mengecilkan keimanan yang lain. Maka perilaku mengkafirkan apalagi kepada saudara seiman perlu dihindari.

Pluralitas masyarakat dari segi agama merupakan keniscayaan, bahkan ditegaskan dalam Qur'an surat al-Hujurat ayat 13: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...”*. Meskipun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang nyata. Dalam konteks historis Nusantara, kesadaran mengenai pluralitas sudah

Muslim yang baik harus selalu menanamkan nilai saling menghormati dalam dirinya.

tumbuh di kalangan ulama Nusantara. Berkaitan dengan itu, berbagai argumen pun dikemukakan oleh para ulama Nusantara untuk menyikapi situasi masyarakat Nusantara yang plural. Pada Abad ke-18, misalnya, Syaikh Yusuf Al-Makassari telah mengemukakan sebuah pandangan sufistik yang bersingungan dengan pluralitas. Dalam *Sirr al-Asrar*, Syaikh Yusuf Al-Makassari memandang bahwa semua yang terjadi dalam wujud, lahir-batin, semuanya adalah baik, tidak ada jeleknya sama sekali karena melihat subyeknya yang hakiki, yakni Allah. Bagi Syaikh Yusuf, berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Qur'an yang memang secara eksplisit menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan kebaikan semua hal yang terjadi di alam ciptaan-Nya. Di samping itu, Allah juga yang menciptakan semua perbuatan manusia. Adapun terkait dengan penilaian baik dan buruk, Syaikh Yusuf Al-Makassari berpandangan bahwa penilaian tersebut muncul atas dasar pertimbang-

an syariat dan adat saja, bukan hakikat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Gus Miek, seorang kiai kharismatik dari Jawa Timur, yang berpandangan bahwa, "Saat memandang diri sendiri, pakailah kaca mata syariat sehingga ketat dalam beribadah. Namun, saat memandang orang lain, pakailah kaca mata hakikat, sehingga tidak mudah menuduh salah" (laduni.co.id). Pandangan Gus Miek dan pandangan sufistik Syaikh Yusuf tersebut penting dike depankan di tengah masyarakat yang plural agar terbentuk suasana harmoni sosial.

Berkaitan dengan seringnya tudingan kafir dan sesat, Gus Nidzam dalam bait-bait *Singir Tanpa Waton*, atau yang dikenal sebagai *Singir Gus Dur* mengemukakan bahwa saat ini banyak orang hafal Qur'an dan Hadits, tetapi ia sering mengkafirkan orang lain, sementara kekafiran dirinya sendiri tidak diperhatikan. Dalam bait tersebut, Gus Nidzam menjelaskan fenomena sebagian orang yang hafal Qur'an dan Hadits yang senang mengkafir-

kan orang lain. Dalam bait tersebut juga dijelaskan bahwa orang tersebut tidak menyadari kekafiran dirinya sendiri karena terselimuti kekotoran di dalam hatinya.

BAGAIMANA CARA MENGHORMATI SESAMA UMAT BERAGAMA?

Menghormati sesama umat beragama dilakukan dengan menjalankan sikap toleransi. Istilah yang dalam bahasa Arab berarti *at-tasāmuḥ* ini artinya menghormati orang lain meski beda keyakinan dan kepercayaan dengan memberi ruang untuknya menjalankan dan mengekspresikan keyakinan agamanya. Toleran berarti mau bersikap terbuka, lapang dada dan lembut dalam menerima perbedaan. Lalu bagaimana sebenarnya cara menghormati sesama umat beragama? Dengan menghormati umat agama lain bukan berarti kita meyakini kepercayaan yang dijalankan umat lain. Tetapi memberikan kebebasan bagi masing-masing pemeluk agama untuk menja-

lankan kepercayaannya dengan tenang dan tanpa gangguan. Kita menghormati sesama umat beragama dengan membiarkan umat agama apa pun mendirikan tempat ibadah dengan leluasa, beribadah dengan tenang, dan merayakan hari besar dengan bebas. Kita tentu saja tidak boleh melarang pendirian tempat ibadah, menghalangi umat lain beribadah, dan mengharamkan perayaan agama lain. Perbuatan tersebut termasuk melukai prinsip penghormatan terhadap sesama umat beragama. Qur'an juga secara tegas telah mengajarkan kita bagaimana menyikapi perbedaan agama. Yang paling penting adalah agama melarang kita untuk menghina agama lain apalagi mempermasalahkannya dan menjadikan konflik. Masing-masing kita bebas menjalankan apa yang diyakini. Ingat, menghormati bukan berarti ikut meyakini agama lain tetapi berupaya memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Hal ini tentu penting untuk merawat Indonesia yang majemuk.

Istilah yang dalam bahasa Arab berarti *at-tasāmuḥ* ini artinya menghormati orang lain meski beda keyakinan dan kepercayaan dengan memberi ruang untuknya menjalankan dan mengekspresikan keyakinan agamanya.

Toh, semua agama tentu mengajarkan kebaikan dan budi luhur. Sudah semestinya semua dapat hidup damai bersama dengan meyakini agama masing-masing sekaligus saling menghormati.

Dalam Islam, Nabi Muhammad telah memberikan teladan yang patut kita ikuti. Di bawah kepemimpinan Nabi di Madinah, toleransi ditegakkan sebagai dasar kehidupan masyarakat yang plural. Piagam Madinah menjadi bukti akan sikap toleran warga Madinah kala itu. Naskah tersebut merupakan perjanjian untuk hidup bersama dan menjaga kerukunan antara muslim dengan non-muslim di Madinah. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati dan hidup rukun. Muslim yang baik bersikap toleran dalam menyikapi keragaman. Terlebih di Indonesia yang terdiri dari keragaman bahasa, suku, agama, dan budaya.

Sebuah keniscayaan bagi masyarakat untuk saling menghormati perbedaan. Tanpa toleransi, persatuan akan sulit tercapai. Negara akan tercerai berai jika masyarakat tidak menerapkan sikap toleran sebagai dasar hubungan antar perbedaan.

Toleransi begitu penting dalam menghadapi perbedaan. Indonesia yang kaya akan ragam budaya, agama, bahasa dan suku hanya bisa terwujud jika penduduknya mampu bersikap terbuka, menerima dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, toleransi menjadi salah satu indikator dalam moderasi beragama. Indikator ini menggarisbawahi peran penting moderasi beragama dalam merekatkan berbagai ragam masyarakat dalam satu kesatuan yang damai dan bebas konflik. Rasa persatuan ini diperlukan untuk keberlang-

sungan negara Indonesia. Sikap toleran dan saling menghormati menjadi landasan dalam mewujudkan persatuan bangsa. Sejak awal, persatuan segala perbedaan menjadi landasan utama berdirinya negara ini. Hal ini tertuang pada prinsip negara Pancasila yang berisi nilai-nilai pengukuh toleransi antar keragaman bangsa. Pada perumusannya, Pancasila mampu menyatukan berbagai pihak dari kelompok nasionalis, muslim dan non-muslim. Meski Indonesia secara filosofis berdasarkan nilai-nilai keagamaan, negara tidak serta merta mendukung keyakinan tertentu tetapi memberikan ruang bagi semua keyakinan tanpa terkecuali. Meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, negara tidak memberikan prioritas tertentu. Semua warga Indonesia tanpa memandang latar belakang agamanya wajib bersikap toleran dan menghargai. Hal ini berarti negara menjunjung tinggi penghormatan pada keragaman penduduknya.

APAKAH ISLAM MEMPERBOLEHKAN MEMILIH PEMIMPIN YANG BERAGAMA NON-MUSLIM?

Perdebatan terkait mengangkat non-muslim sebagai pemimpin telah lama terjadi di Indonesia. Ghalib Surat al-Māidah ayat 51 digunakan sebagai legitimasi bagi keharaman mengangkat non-muslim menjadi pemimpin. Lantas sejatinya seperti apa pandangan ulama tafsir terkait al-Māidah ayat 51, apakah ini bisa jadi dasar keharaman memilih non-muslim sebagai pemimpin? Terlebih dahulu simak firman Allah dalam Surat al-Māidah ayat 51:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya/wali; sebagian mereka adalah wali bagi sebagian lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka wali, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.”

Secara sepintas terlihat dalam ayat di atas, bila kita baca terjemahannya bahwa melarang orang beriman untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, karena mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Kemudian muncul persoalan, apa makna kata wali dalam ayat tersebut? Dalam Al-Qur'an kata *awliyā'*, setidaknya terdapat 35 sampai 42 kali yang tersebar mencakup 40 ayat, yang tersebar dalam 23 surah dalam Al-Qur'an.

Kata wali atau *awliyā'* dalam bahasa Arab merupakan bentuk homonim—satu kata yang memiliki banyak makna. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman luas dalam mengartikan *awliyā'*. Terkait dalam Q.S al-Māidah; 51, penafsiran kata *awliyā'* pun beragam, tidak tunggal sebagai pemimpin—sebagaimana dikatakan oleh mereka yang menjadikan legitimasi pengharaman ayat ini sebagai memilih pemimpin non-muslim.

Menurut Muhammad Sayyid al-Tantawi, Ulama besar dari Al Azhar dalam *Tafsīr al Wasīt Lil*

Qur'an al Karīm menerangkan bahwa kata *awliyā'* adalah bentuk jamak dari kata wali. Pun kata *awliyā'* ini memiliki tiga makna yakni kekasih (*ahbāb*), teman baik (*asdaqā'*), dan penolong (*al-nasrā'*). Ulama Mesir ini tidak mengartikan kata *awliyā'* dalam Q.S al-Māidah; 51 sebagai pemimpin. Menurut Ibnu Jarir al Thabari dalam kitab Tafsīr Al Thabarī, para ulama berbeda pendapat terkait makna *awliyā'* dalam Q.S al-Māidah; 51. Namun yang terkuat kata *awliyā'* itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far adalah *anshār* (penolong) dan *hulafā'* (sekutu).

APAKAH MEMBANTU SELAIN MUSLIM DI-BOLEHKAN?

Boleh. Membantu sesama manusia pada dasarnya ajaran universal yang diajarkan semua agama. Islam mengajarkan berbuat baik untuk seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Rasulullah dalam banyak hadisnya berpesan agar kita berbuat baik kepada non-muslim. Bahkan dalam hadis sahih, Rasulullah sampai

... para ulama berbeda pendapat terkait makna *awliyā'* dalam Q.S al-Māidah; 51. Namun yang terkuat kata *awliyā'* itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far adalah *anshār* (penolong) dan *hulafā'* (sekutu).

mengancam muslim yang menyakiti non-muslim itu tidak akan mencium harumnya surga.

Memang Allah pernah menegur Rasulullah melalui turunnya surat Al-Baqarah ayat 272 yang sempat melarang sahabatnya bersedekah kepada keluarga non-muslim. Saat itu Rasulullah mensyaratkan sahabatnya boleh bersedekah kepada keluarga non-muslim apabila mereka sudah butuh sekali. Harapannya mereka dapat masuk Islam karena diberi bantuan.

Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Asma, putri Abu Bakar, pernah meminta fatwa kepada Rasulullah apakah ia boleh memberikan bantuan pada ibunya yang berbeda agama. Rasul pun membolehkannya. Selain itu, masih dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat Umar juga pernah memberikan pakaian kepada saudara seibunya

Utsman bin Hakim yang merupakan non-muslim. Dalam riwayat lain diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. pernah memperbolehkan kaum Nasrani Najran untuk melakukan kebaktian di masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah menegur para sahabat yang melarang kebaktian tersebut [Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, 1999, h 50]. Dalam riwayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang muslim boleh membantu non-muslim bukan hanya perihal sehari-hari, tetapi juga membantu non-muslim dalam hal melakukan ibadahnya.

KENAPA DISKRIMINASI MINORITAS MA-SIH ADA?

Ada banyak alasan diskriminasi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia. *Pertama*, ketidaktahuan yang berasal dari minimnya perjum-

paan. Karena Indonesia negara multikultur dan berpulau-pulau, masyarakat Indonesia rentan terhadap konflik lantaran jarang ada kesempatan untuk bertemu apalagi dengan kelompok dan agama yang berbeda. Kelompok mayoritas juga sedikit punya kesempatan berjumpa dengan kelompok minoritas. Minimnya perjumpaan tersebut memunculkan minim pengetahuan, sehingga prasangka menjadi dasar hubungan antar kelompok. Inilah yang kemudian membuka peluang bagi diskriminasi. Banyak kasus diskriminasi seperti pengkafiran maupun penolakan terhadap minoritas didasari oleh ketidaktahuan.

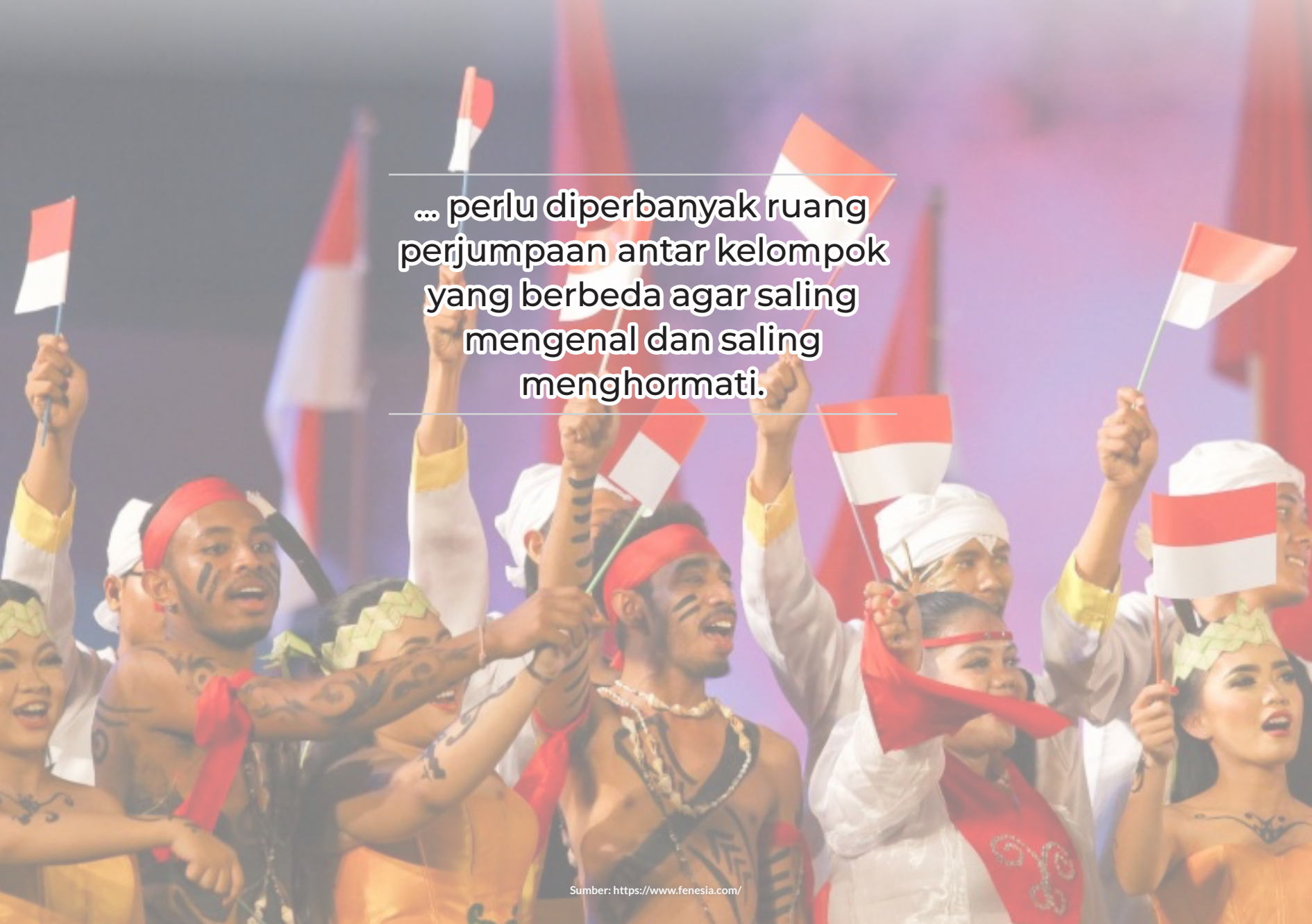
Kedua, kelompok mayoritas merasa perlu diprioritaskan dibandingkan minoritas. Disebabkan jumlahnya yang lebih banyak, kelompok mayoritas merasa lebih dominan dibandingkan kelompok minoritas. Sehingga dalam beberapa hal, kelompok mayoritas merasa harus menjadi prioritas utama ketimbang kelompok lain yang jumlahnya

lebih kecil. Hal ini yang membuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan setara belum dapat dicapai. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas pun acap terjadi karena alasan ini.

Ketiga, belum ada payung hukum yang dapat melindungi minoritas secara penuh. Hukum yang ada bahkan memungkinkan terjadinya diskriminasi. Beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan kurang menunjukkan teladan bagi masyarakat. Alih-alih mendukung keberadaan kelompok minoritas, berbagai aturan, kebijakan, dan hukum masih memberikan ruang bagi diskriminasi. Di beberapa kasus, pemerintah daerah memberlakukan aturan yang cenderung intoleran dan kurang mendukung upaya saling menghormati keyakinan yang berbeda. Ditambah lagi, lembaga keagamaan resmi di bawah negara juga turut mengeluarkan fatwa yang bernada diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Hal ini kemudian dijadikan dasar perilaku diskriminasi.

Maka solusinya perlu diperbanyak ruang pertemuan antar kelompok yang berbeda agar saling mengenal dan saling menghormati. Dengan bekal pengetahuan, masyarakat mampu mengembangkan pertemanan yang mengedepankan kasih sayang terhadap sesama manusia dan mengurangi prasangka buruk terhadap kelompok minoritas

yang kerap disalahpahami karena jumlahnya yang sedikit. Kelompok mayoritas juga tidak lagi merasa lebih dominan karena sudah mengenal saudaranya yang minoritas. Lagipula, bukankah dulu Adam dan Hawa awalnya tidak saling mengenal, hingga Allah turunkan kasih sayang di antara mereka karena saling berjumpa.

A group of people, including men and women, are shown in traditional Indonesian attire, such as white shirts, red headbands, and traditional headpieces. They are all smiling and waving small Indonesian flags (red and white) in the air. The background is a soft, out-of-focus purple and blue gradient. The text is centered over the image, enclosed in a white-bordered box.

... perlu diperbanyak ruang
perjumpaan antar kelompok
yang berbeda agar saling
mengenal dan saling
menghormati.

BAB 4 | **NEGARA, AGAMA, DAN MODERASI BERAGAMA**

Moderasi beragama sering diadu dengan eksistensi pengamalan, cara pandang, dan sikap seseorang terhadap agama. Akibatnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa moderasi beragama berupaya membelenggu agama itu sendiri. Hal ini jelas tidak tepat. Agama itu suci yang langsung turun dari Allah lewat para nabi. Nabi merupakan juru bicara Allah di muka bumi agar manusia dapat

memahami pesan-pesan dalam agama. Namun dalam perkembangannya, ketika nabi tidak lagi turun ke Bumi, Allah tidak punya juru bicara. Hanya ada jejak-jejak Allah dalam berbagai perkamen suci maupun contoh-contoh perilaku Nabi yang diriwayatkan oleh generasi-generasi setelah nabi wafat. Semua akhirnya punya tafsir masing-masing, sesuai kaidah imam-imam besar yang diikutinya, dalam mengamalkan ajaran

agama. Dalam praktiknya, ada pengalaman praktik beragama yang berlebihan sehingga mengancam kedaulatan negara. Hal inilah yang coba diantisipasi dalam menjalankan moderasi beragama. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan membaca jawaban-jawaban atas pertanyaan di bawah ini terkait negara, agama, dan moderasi beragama.

APAKAH PRINSIP MODERASI BERAGAMA PANCASILA BERTENTANGAN DENGAN AJARAN ISLAM?

Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau moderasi adalah kompromi tertinggi, atau strategi terbaik, untuk mempertemukan keragaman yang saling mematikan jika dibiarkan, maka siapapun atau dari manapun asalnya, solusi moderasi yang datang dari luar Islam sekalipun, pasti akan sejalan dengan Islam. Apalagi kalau berasal dari Pancasila, yang sesungguhnya lahir dari rahim Islam. Semangat para pendiri bangsa dilandasi oleh keis-

laman yang sangat kuat tentang bahaya penjajahan bukan hanya bagi masa depan bangsa tetapi juga bagi kemanusiaan secara keseluruhan dan oleh karena itu, harus dihapuskan dari muka bumi. Itulah yang menyebabkan para ulama, kyai, santri dan tokoh-tokoh masyarakat berjuang melawan penjajah. Yang dihancurkan oleh para penjajah ketika datang ke Indonesia adalah kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di pantai. Akar-akar keislaman yang ada dalam diri bangsa ini semakin menguat ketika ajakan melawan penjajah dikumandangkan. Pesantren sebagai pusat penyebaran Islam mengambil kepemimpinan.

Setelah cita-cita kemerdekaan tercapai para pejuang kemerdekaan meneruskan cita-cita mereka untuk mengisi kemerdekaan itu. Dalam proses pendirian negara bangsa, mereka berdebat panjang tentang dasar negara. Dan mereka terbelah menjadi dua bagian besar: Kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Menghindari konflik

berkepanjangan dan keterbelahan bangsa, kelompok Islam melakukan kompromi besar yang sering kali disebut sebagai “hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia”. Mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara dan setuju menghapuskan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dari Sila Pertama. Sama dengan yang dilakukan Nabi ketika menghapuskan ‘Bismillah’ dan ‘Muhammad Rasulullah’ dalam Perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraisy dan Nabi menyetujuinya walaupun para Sahabat besar termasuk Umar sangat keberatan. Posisi masyarakat muslim yang sangat kuat, setelah berhasil mengalahkan dan mempermalukan kafir Quraisy di Perang Khandaq yang terkenal, disusul dengan bergabungnya suku-suku lain yang lebih luas setelah peperangan itu, telah menyulitkan masyarakat muslim menerima kompromi. Bagaimana mau berkompromi pada posisi sudah sangat kuat? Nabi

melihat kepentingan jangka panjang yang lebih besar. Demikian juga para pejuang bangsa.

Pancasila adalah kompromi terbaik hasil ijtihad para ulama untuk mempertemukan keragaman untuk kesatuan negara bangsa. Nilai-nilai keislaman (ketuhanan yang Maha Esa [Sila No 1]), dipertemukan dengan keindonesiaan (Persatuan Indonesia [Sila 3], Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan [3],) dan kemanusiaan (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab [Sila 4] dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia [5]). Atau lebih tepatnya nilai-nilai keislaman mewujudkan dalam keindonesiaan dan kemanusiaan. Dan karena nilai dan wujud saling menyatu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Dalam perpektif Dua Kalimah Syahadat (Syahadat pertama adalah ketuhanan dan syahadat kedua adalah kemanusiaan) dan karena itu dua kalimah syahadat adalah titik temu antara ketuhanan dan kemanusiaan, maka Pancasila ada-

lah wujud terbaik dua kalimah shadat—titik temu antara ketuhanan dan kemanusiaan—dalam konteks keindonesiaan.

Kalau moderasi beragama adalah titik temu terbaik di antara nilai-nilai ketuhanan yang tak terbatas (Syahadat Pertama) dengan kemanusiaan yang terbatas (dengan batas-batas sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkarinya), maka Pancasila adalah kompromi terbaik bangsa ini sebagai hasil ijma para ulama terdahulu. Dengan kata lain, sekali lagi, Pancasila adalah wujud moderasi beragama yang terbaik untuk Indonesia. Menggantinya dengan dasar lain akan menghancurkan dasar-dasar kebangsaan yang sudah diletakkan para ulama. Seperti yang diajarkan Nabi setelah setiap kali perjanjian, yang harus dilakukan ada-

lah menghormati dan menjaga setiap perjanjian, bukan melanggarnya, apalagi menggantinya sebelah pihak dan memaksakan gantinya kepada setiap masyarakat yang terkait dengan perjanjian itu.

Dalam pengalaman Indonesia, prinsip moderasi beragama Pancasila jelas sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika melihat sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar agama, tampak para tokoh Islam memainkan peran penting dalam proses penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tersebut sangat sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang plural, baik dari etnis maupun agama. Dengan demikian Pancasila dapat memayungi semua masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, jika melihat

Kalau moderasi beragama adalah titik temu terbaik di antara nilai-nilai ketuhanan yang tak terbatas (Syahadat Pertama) dengan kemanusiaan yang terbatas (dengan batas-batas sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkarinya), maka Pancasila adalah kompromi terbaik bangsa ini sebagai hasil ijma para ulama terdahulu.

rincian sila yang terdapat dalam Pancasila, tampak bahwa semua sila yang ada sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama menekankan untuk tidak mempertentangkan Pancasila dengan agama. Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam yang dihasilkan oleh ulama, antara lain, dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila bukan agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, menjiwai sila-sila yang lain. Sila Ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Pandangan bahwa sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan tauhid menurut Islam dengan sendirinya menunjukkan betapa sila pertama tersebut merupakan prinsip dasar agama Islam. Bukankah Islam adalah

agama tauhid? Bukankah syahadat pertama yang diucapkan oleh seorang muslim adalah penegasan atau afirmasi terhadap tauhid? Dan bukankah yang diharapkan oleh kaum muslimin ketika nanti waktunya tiba adalah mati dengan membawa tauhid? Melihat kesesuaian Pancasila dengan ajaran Islam tersebut, tidak mengherankan jika sebagai ulama pesantren justru meminta umat Islam untuk mensyukurinya. Dalam hal ini, para ulama melihat bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran Islam, bahkan dirumuskan oleh ulama Islam. Oleh karena itu, bagi ulama, tidak ada alasan untuk menolak Pancasila sebagai dasar negara.

Jika Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, maka dengan sendirinya moderasi beragama Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penolakan sebagian orang terhadap moderasi beragama Pancasila dengan dalih tidak sesuai, atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, menunjukkan kedangkalan pemahaman orang

tersebut terhadap ajaran tauhid secara khusus dan ajaran-ajaran Islam lainnya secara umum.

APAKAH MODERASI BERAGAMA ADALAH BENTUK KEBIJAKAN NEGARA YANG BERSIFAT PEMAKSAAN TERHADAP BERKEYAKINAN SESEORANG?

Moderasi beragama adalah bentuk pemaksaan negara terhadap keyakinan seseorang adalah anggapan yang kurang tepat. Moderasi beragama adalah jalan menuju keseimbangan, tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan, ekstrem atas, atau bahkan ekstrem bawah. Itu artinya, tanpa menjadi sebuah kebijakan, seseorang memang harus mengaplikasikan moderasi beragama. Orang tidak boleh menjadi sangat liberal, sangat ekstrem dalam beragama sehingga mengganggu keberagamaan orang lain, dan sebaiknya menjauhi segala eskremitas.

Firman Allah dalam Quran surat al-Baqarah ayat 143 bahkan menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan (*ummatan wasathan*). Firman ini juga sejalan dengan pengalaman yang dilakukan oleh Nabi yang menganjurkan agar manusia tidak berlebih-lebihan (ekstrem). Nabi di saat yang sama mendorong manusia untuk beprestasi sebaik mungkin di dunia dan beribadah mengejar akhirat seolah-olah kematian sudah di depan mata. Ini artinya, moderasi beragama ataupun moderasi Islam tidak berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam.

Lantas, apakah ada pemaksaan secara terikat bagi masyarakat? Jawabannya tidak ada. Hanya saja, moderasi beragama harus selalu diamalkan sebagai bagian dari umat beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat majemuk di dunia, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Moderasi beragama adalah jalan menuju keseimbangan, tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan, ekstrem atas, atau bahkan ekstrem bawah. Itu artinya, tanpa menjadi sebuah kebijakan, seseorang memang harus mengaplikasikan moderasi beragama.

APAKAH PANCASILA BERTENTANGAN DENGAN AGAMA?

Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Keduanya merupakan hal yang tidak berseberangan. Ajaran agama merupakan aturan kehidupan beragama sementara Pancasila merupakan aturan kehidupan bernegara. Agama Islam sendiri tidak memiliki aturan yang baku tentang sistem tata negara. Umat diberikan kebebasan dalam merancang sistem yang sesuai kebutuhan wilayahnya. Dalam proses pendirian negara, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang paling sesuai dan terbaik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman dilihat dari berba-

gai ragam suku, etnis budaya dan agama. Dalam upaya menghargai kekayaan ragam tersebut, negara dibangun dengan kesadaran persatuan dan kesatuan. Prinsip negara tidak diambil dari agama tertentu melainkan yang dapat menyatukan berbagai kepercayaan. Perbedaan rentan melahirkan konflik sehingga Pancasila dibutuhkan sebagai pemersatu bangsa. Ia hadir untuk mempersatukan bukan mempertajam perbedaan. Para pendiri bangsa yang turut merumuskan Pancasila adalah perwakilan dari berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya agamawan dan ulama. Maka tentu saja tidak ada pertentangan antara agama dengan Pancasila. Bahkan jika digali lebih dalam lagi, Pancasila mengandung nilai-nilai keagamaan yang cukup kuat.

Istilah Pancasila sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, 'Panca' yang berarti lima dan 'syla' yang berarti sendi. Arti nama ini melambangkan Pancasila dengan kelima silanya sebagai sendi kehidupan bernegara penduduk Indonesia. Lima sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan tetapi sejalan dengan ajaran agama. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menggambarkan prinsip keimanan. Warga Indonesia percaya pada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila ini juga bermakna rasa saling menghormati agama dan kepercayaan. Ia menjamin adanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Sila kedua sesuai bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip kemanusiaan. Warga Indonesia mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,

warna kulit, dan sebagainya. Prinsip ini mengharuskan perlakuan kepada sesama manusia sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Saling menyayangi, tenggang rasa dan berlaku adil menjadi dasar hubungan sesama manusia.

Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia membawa prinsip persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan negara Indonesia serta kepentingan dan keselamatan bangsa menjadi prioritas seluruh warga dan dianggap sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Perbedaan suku, agama dan budaya bukan memecah belah tapi menyatukan bangsa. Rasa cinta tanah air dan bangsa dipupuk melebihi kecintaan kepada kelompok tertentu.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini mengandung prinsip demokrasi. Warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di sisi lain,

warga tidak dibolehkan memaksakan kehendak pada orang lain. Jika ditemukan perbedaan pendapat maka diselesaikan dengan musyawarah. Sila ini juga menjadi dasar bagi pemilihan wakil rakyat yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membawa prinsip keadilan sosial. Hal ini mencerminkan cita-cita negara Indonesia yang menginginkan tidak adanya kesenjangan antar warga, bahwa kesejahteraan milik semua warga negara tanpa memandang status dan kedudukan.

Kelima sila di bawah Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. Bahkan prinsip yang terkandung di dalamnya bernafas senada dengan ajaran agama. Tentu saja pengamalan Pancasila tidak terlepas dari semangat agama. Pancasila bukan untuk mengganti posisi agama melainkan menguatkannya.

Menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim tidak membuat Indonesia menjadi negara yang berlandaskan asas Islam. Pancasila hadir sebagai pedoman utama dalam menjalankan tata negara. Ajaran Islam pada dasarnya bersifat universal yang juga terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks Indonesia, penerimaan terhadap Pancasila adalah perwujudan dari universalitas ajaran agama Islam. Bukan berarti muslim tidak memiliki tempat di bawah negara. Semua penduduk apa pun agamanya, termasuk muslim, bebas menjalankan agamanya tanpa terkecuali. Toleransi antar umat agama menjadi dasar kerukunan yang membuat masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, budaya, bahasa dan suku dapat hidup berdampingan dengan damai.

Nilai-nilai Pancasila juga sangat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pancasila di masa ini bagaikan piagam Madinah di zaman Rasulullah. Pancasila berfungsi mempersatukan masyarakat

Toleransi antar umat agama menjadi dasar kerukunan yang membuat masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, budaya, bahasa dan suku dapat hidup berdampingan dengan damai.

Indonesia yang berbeda ras, agama, budaya, dan bahasa. Pada masa Rasulullah, piagam Madinah juga dijadikan landasan untuk mempersatukan yang berbeda.

APAKAH ISLAM MEMERINTAHKAN PENGANUTNYA MEMBELA NEGARA?

Dalam pandangan ulama, kawasan Indonesia merupakan *Darul Islam* dalam pengertian daerah Islam, bukan negara Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan selama berabad-abad dikuasai oleh kerajaan Islam, sehingga terbentuk masyarakat Islam dan budaya Islam. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis dari pandangan tersebut, kemerdekaan Indonesia, harus dibela, termasuk dari gerakan-gerakan pemberontakan dan gerakan separatis.

Dalam pandangan ulama, tindakan pemberontak kepada NKRI merupakan tindakan *bughat* yang haram. Sejelek apa pun pemerintahan, yang harus dilakukan oleh umat Islam hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*, bukan pemberontakan. Dalam pandangan ulama, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah haram, meskipun pemerintahnya fasik dan zalim. Pengharaman terhadap pemberontakan terhadap pemerintah yang sah didasarkan atas pertimbangan bahwa, pemberontakan dapat mengakibatkan fitnah yang lebih besar, huru-hara, pertumpahan darah, dan konflik antargolongan. Sementara itu, berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap pemerintah yang zalim, maka *amar ma'ruf nahi munkar* tidak boleh dilakukan dengan cara anarkhis, tetapi dengan cara yang etis. Dalam konteks Indonesia

Dalam pandangan ulama, tindakan memberontak kepada NKRI merupakan tindakan *bughat* yang haram. Sejelek apa pun pemerintahan, yang harus dilakukan oleh umat Islam hanyalah *amar ma'aruf nahi munkar*, bukan pemberontakan.

modern, *amar ma'aruf nahi munkar* harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional untuk menghindari fitnah yang lebih besar.

Dalam konteks pembelaan kepada Negara Indonesia, umat Islam telah terbukti sumbangsinya dalam memperjuangkan dan membela tanah air, baik terhadap invasi asing maupun terhadap pemberontakan terhadap NKRI. Lebih dari itu, menurut ulama, perjuangan secara militer untuk membela tanah air dalam batas tertentu hukumnya adalah *fardu 'ain*, dan dalam batas-batas yang lain hukumnya adalah *fardu kifayah*. Hukum *fardu 'ain* dengan sendirinya menunjukkan bahwa kewajiban yang mengikat kepada setiap individu umat Islam, sedangkan *fardu' kifayah* menunjukkan kewajibannya yang sifatnya fakultatif, sehingga jika ada sebagian yang melaksanakannya, maka

gugurlah kewajiban atas yang lain. Apapun kategorinya, penyematan hukum *fardu 'ain* dan *fardu kifayah* berkaitan dengan pembelaan kepada negara tersebut menunjukkan bahwa, membela negara Indonesia bukan hanya kewajiban sebagai warga Negara, tetapi, lebih dari itu, juga merupakan kewajiban agama.

Selain itu, Mencintai tanah air merupakan bagian dari keimanan yang harus diyakini. *Hubbul wathan minal iman* 'cinta tanah air atau negara itu bagian dari keimanan'. Itulah ajaran para ulama salaf yang bersumber dari Rasulullah. Salah satu manifestasi dari cinta tanah air adalah pembelaan terhadap negara. Oleh karena itu, membela negara merupakan ajaran Islam yang diajarkan para ulama.

Sahabat Ali pernah berkata, “Tak ada tanah air yang lebih baik dari tanah air yang lain, kecuali tanah air yang Anda kuasai.” Negara atau tanah air itu tempat di mana kita merasa aman, nyaman, dan bebas melaksanakan apapun yang kita yakini benar selama tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain.

APAKAH HORMAT KEPADA BENDERA MERAH PUTIH ITU BOLEH?

Bendera merah putih merupakan simbol Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai simbol negara bendera merah putih harus dihormati. Dari sudut pandang syariat Islam, penghormatan kepada bendera merah putih hukumnya diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan?

Tidak dapat dipungkiri, setiap negara memiliki simbol negara yang harus dihormati. Demikian juga negara Indonesia yang memiliki simbol negara, antara lain, bendera merah putih. Secara umum, tidak ada persoalan di kalangan mayori-

tas umat Islam untuk melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih. Berkaitan dengan itu, ulama Indonesia sudah mendiskusikannya. Dalam pandangan ulama, penghormatan berbeda dengan kultus yang mengarah pada tindakan penyembahan. Oleh karena itu, penghormatan kepada bendera merah putih bukan tindakan kultus atau penyembahan, sehingga penghormatan kepada merah putih diperbolehkan menurut agama. Selain itu, penghormatan terhadap sesuatu yang termasuk kategori simbol juga sudah dilakukan oleh umat Islam generasi awal, bahkan sejak masa Nabi Muhammad. Sebagai contoh, ketika melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga dianjurkan untuk mencium hajar aswad ketika *thawaf*. Adapun berkaitan dengan penggunaan simbol tertentu, seperti bendera, maka hal itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, penggunaan bendera sebagai simbol juga bukan hal baru, melainkan jauh sebelumnya sudah dilakukan oleh Nabi

Muhammad dalam sejumlah peperangan. Dalam sejumlah peperangan pada masa Nabi, panglima perang memegang panji. Jika panglima perang gugur, maka panji itu kemudian dipegang oleh panglima yang menggantikannya. Selain itu, dalam sejumlah peperangan, Nabi Muhammad juga secara langsung menyerahkan panji-panji ke setiap pemimpin kabilah, dan di bawah panji-panji itu para pemimpin kabilah berperang.

Belajar dari pengalaman historis umat Islam generasi awal yang banyak menggunakan simbol tertentu, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dapat dipahami bahwa ulama Indonesia tidak mempersoalkan penghormatan kepada simbol Negara, termasuk penghormatan kepada merah putih. Yang ditekankan oleh para ulama adalah niat dalam tindakan itu. Jika niatnya adalah menghormati, maka hukumnya adalah boleh, sementara jika niatnya adalah menyembah, maka hukumnya adalah haram, bahkan bisa menjerumuskan pada

praktik kemusyrikan. Dalam pandangan ulama, penghormatan berbeda dengan penyembahan. Oleh karena itu, yang terlarang adalah penyembahan kepada simbol. Dengan demikian, penghormatan terhadap bendera merah putih merupakan tindakan penghormatan yang tidak bertentangan dengan akidah, terlebih jika penghormatan tersebut dapat memperkokoh kecintaan terhadap tanah air.

Selain itu, Menghormati bendera Merah Putih itu pada dasarnya memuliakan jasa para pahlawan yang membuat bendera Merah Putih dapat berkibar sebagai simbol kemerdekaan. Menghormati bendera tidak dapat disamakan dengan menyembah terhadap bendera tersebut. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga pernah menangis karena panji atau bendera perang itu berpindah tangan dari satu sahabat ke sahabat lain karena gugur dalam peperangan. Rasulullah bukan sedang menangisi bendera, akan tetapi menangisi

Yang ditekankan oleh para ulama adalah niat dalam tindakan itu. Jika niatnya adalah menghormati, maka hukumnya adalah boleh, sementara jika niatnya adalah menyembah, maka hukumnya adalah haram, bahkan bisa menjerumuskan pada praktik kemusyrikan.

para sahabat memimpin perang berguguran satu persatu.

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa bendera itu simbol perjuangan dan pengorbanan. Penghormatan terhadap bendera bukanlah bentuk penghormatan pada selain Allah. Penghormatan terhadap bendera merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Lagipula, bukankah kecintaan terhadap tanah air bagian dari iman?

APAKAH ISLAM MEWAJIBKAN KHILAFAH?

Mewujudkan khilafah adalah wajib karena memang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Sistem yang dijalankan seorang khalifah di-

sebut khilafah. Karena semua kita adalah manusia, maka semua kita adalah khalifah. Sistem khilafah semestinya berjalan atas dasar keyakinan bahwa manusia—walaupun dikritik Malaikat sebagai pembuat kerusakan dan penumpah darah—adalah makhluk terbaiknya Allah yang diberi kekuatan spiritual (*ruh*) dan material (*jasad*) untuk menjalankan fungsi khilafahnya. Nilai-nilai dan ajaran yang ada dalam Dzat Allah diwujudkan di alam materi melalui Nabi Adam dan keturunannya sampai Nabi Muhammad. Pertemuan antara *ruh* dan *jasad*, wahyu dan akal, bumi dan langit, ketuhanan dan kemanusiaan, melahirkan kreatifitas merdeka. Tentu ada keterbatasan dalam kemerdekaan itu, tetapi masing-masing manusia, dengan kekuatan akal dan bimbingan wahyu, diberi kebebasan

untuk menentukan batas mana yang akan diambil. Di antara semua makhluk Allah, hanya manusia yang diberi kemewahan kemerdekaan memilih ini, dan di akhirat nanti setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertemuan antara *ruh* (abstrak, berasal dari Allah) dan *jasad* (berasal dari tanah), ditambah kemerdekaan memilih inilah yang membuat agama bisa berfungsi.

Khilafah adalah wujud dari tanggung jawab manusia untuk mewujudkan kebaikan di dunia (menjaga alam, lingkungan, dan kehidupan) di jalan Allah. Untuk menangkap ajaran Allah yang sangat abstrak, dan mewujudkannya dalam keseharian alam semesta, memerlukan kebebasan. Tanpa kebebasan manusia tidak akan bisa bekerja dengan baik, karena pandangan bahwa segalanya sudah dipastikan akan menutup kerja. Kebodoh-

an dan keterbatasan manusia jadi kekuatan untuk selalu mencari dan mengerti segala jenis aturan (*sunnatullah*)—baik aturan agama maupun aturan alam—agar mereka bisa mengolahnya dengan baik. Mengetahui mana batas-batas yang tidak bisa dilanggar dan melawan hukum, sangat diperlukan untuk menjaga alam ini berjalan. Menemukan semua hukum, menafsirkan, dan menjalankannya untuk mengelola hidup adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dan sistem yang dijalaninya ini disebut khilafah dan wajib dijalankan karena kalau tidak kita telah melanggar kemanusiaan kita, maka kita menjalankan kehidupan seperti layaknya binatang.

Kalau menjalankan khilafah itu wajib, kenapa jadi masalah ketika ada kelompok masyarakat yang ingin mewujudkannya? Kita bisa membagi khilaf-

Khilafah adalah wujud dari tanggung jawab manusia untuk mewujudkan kebaikan di dunia (menjaga alam, lingkungan, dan kehidupan) di jalan Allah.

ah menjadi dua: *khilafah adamiyah* dan *khilafah siyasiah*. Sementara *khilafah adamiyah* adalah khilafah yang melekat pada fungsi Adam dan keturunannya sebagai wakil Allah di atas bumi untuk mengabdikan kepada Allah dalam mewujudkan nilai-nilai Islam untuk kesempurnaan kemanusiaan kita sekaligus kebaikan alam semesta. Sementara *khilafah siyasiah* adalah sistem yang diciptakan manusia belakangan (bukan bagian dari penciptaan manusia oleh Allah) untuk memenuhi hawa nafsu kekuasaannya. Dari sisi tujuan, *khilafah siyasiah* ini hanyalah sebagian kecil saja dari *khilafah adamiyah*. Dia adalah fungsi tambahan yang lalu menindih fungsi dasar penciptaan manusia. Kalaupun diklaim sebagai sama-sama bertujuan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Allah di muka bumi, dasar kedua khilafah ini berbeda. Sementara *khilafah adamiyah* berbasis kemanusiaan terbuka, dimana segala bentuk kelembagaan nilai-nilai Islam sesuai perubahan ruang dan waktu diterima

sepanjang tidak bertubrukan dengan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan Islam, *khilafah siyasiah* hanya mengenal satu bentuk kelembagaan yang diklaim universal dan menekan sisi kemanusiaan kita sedalam-dalamnya. Khilafah tidak lagi dilihat sebagai sebagian kecil saja dari keragaman wujud Islam dalam masyarakat muslim, tetapi sebagai keseluruhan Islam atau Islam itu sendiri. Yang tidak mendukungnya adalah kafir.

Tentu saja politik diperlukan untuk mewujudkan kepentingan kemanusiaan. Tanpa kekuasaan tidak akan ada aturan. Aturan sangat diperlukan untuk menjaga kebaikan dan kepentingan manusia yang lebih banyak. Apakah khilafah tidak akan mampu mewujudkan kepentingan manusia yang lebih banyak? Dengan kata lain, apakah khilafah bisa dipakai untuk mewujudkan kemanusiaan kita? Kalau yang dibayangkan adalah sistem pengelola kekuasaan yang dikelola Nabi, maka tentu

saja bisa. Nabi tidak berjuang untuk sekelompok kecil orang yang akan berkuasa, tapi kepentingan semua orang dengan prinsip persaudaraan sesama manusia yang terbuka untuk melawan kesempitan suku. Semangat kemanusiaan itulah yang membuat Nabi kemudian berhadapan dengan suku Quraisy dan dengan siapapun yang mengancam keterbukaan. Semangat kemanusiaan itulah yang tidak dijamin oleh para pengusung khilafah.

Memang bahasa-bahasa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta juga menggema, tetapi rujukan yang dipakai untuk membayangkan khilafah adalah Turki Utsmani—atau mungkin Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Padahal tema-tema Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tidak mungkin diwadhahi oleh semangat kesempitan. Atau lebih tepatnya semangat kesempitan khilafah yang dipresentasikan dengan semangat kesukuan. Bukankah Turki Utsmani itu nama suku? Bukankah Abbasiyah dan Bani Umayyah itu merujuk ke semangat per-

orangan yang berhimpitan dengan kesukuan yang lalu dijadikan rujukan? Khilafah Nabi tidak pernah mengasosiasikan diri dengan nama orang atau nama suku. Malah suku-suku yang ada sebelum Islam sudah dileburkan ke dalam pengelompokan berdasar fungsi dan prestasi. Muhajirin adalah nama fungsi dan prestasi orang-orang Mekah yang memilih untuk melawan sukuisme sukunya sendiri, dengan cara migrasi (*hijrah*) dari Mekah sebagai pusat kota kekuasaan sukunya ke Madinah daerah pertanian yang dikuasai suku lain. Migrasi ini, dari sisi kepentingan personal, adalah kemunduran besar. Karena Quraisy adalah suku yang paling kuat, sebagai anggota, mereka banyak mendapatkan keuntungan sosial, politik dan ekonomi yang baik. Tentu di kalangan Muhajirin ini ada juga suku di luar Quraisy seperti Salman dan Bilal, tetapi jumlahnya sedikit.

Demikian juga Ansar. Ini adalah nama capaian dari suku Aus dan Khazraj yang berani menerima

Nabi walaupun diancam diperangi oleh suku Quraisy yang sangat kuat. Merekalah yang menjadi tulang punggung kekuatan penyebaran Islam terutama di masa-masa awal. Kekhawatiran Nabi untuk mengajak mereka berperang di luar Madinah karena tidak sesuai dengan karakter mereka sebagai petani dan semangat komitmen awal untuk melindungi Nabi dari serangan suku Quraisy dan sekutu-sekutunya dari luar Madinah (lebih banyak defensif daripada ofensif) dihilangkan sendiri oleh kaum Ansar. Memahami kekhawatiran Nabi, mereka menegaskan bahwa mereka siap dibawa Nabi ke manapun demi perjuangannya.

Awalnya memang penduduk Madinah mengundang Nabi migrasi ke tempat mereka karena kelelahan akibat konflik yang berkepanjangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di Madinah: terutama Aus dan Khazraj (suku-suku Arab) di satu sisi, serta Nadhir dan Qaynuqa (suku-suku Yahudi) di sisi lain. Kadang-kadang Aus melawan Khazraj,

kadang Aus bersekutu dengan suku-suku Yahudi melawan Khazraj atau sebaliknya, kadang Aus bersatu dengan Khazraj melawan Yahudi. Keberhasilan Nabi memenuhi harapan Ansar untuk menciptakan kedamaian di Madinah telah menjadi dasar yang sangat kuat bagi Ansar untuk ikut bersama Nabi menyebarkan perdamaian di tempat-tempat lain, walau melalui peperangan. Perang untuk damai.

Tidak mudah bagi Nabi untuk membangun komunitas damai di Madinah apalagi dengan melibatkan komunitas yang ada di luar Madinah. Tetapi semangat menjunjung tinggi kemanusiaan manusia atas dasar nilai-nilai dan ajaran Islam telah membuka katup kemanusiaan yang lebih luas. Kemanusiaan yang telah terkooptasi oleh kekuasaan yang mengeksploitasi sesama manusia, melahirkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, telah membuka ruang baru untuk pembebasan masyarakat yang lebih luas dari ikatan-ikatan sempit yang se-

lama ini memenjarakan mereka. Semangat kemanusiaan terbuka dan egaliter itulah yang ditegaskan Nabi pada saat Mekah ditaklukan dan menjadi prinsip yang harus dijalankan para pengikutnya di setiap kali penaklukan.

Allah melalui para nabinya melakukan banyak langkah penting untuk menghapuskannya melalui berbagai peraturan hukum yang tertuang dalam kitab suci. Untuk menghapuskan perbudakan, misalnya, Islam mengharuskan umatnya membebaskan budak untuk membayar hukuman dan mengubah status anak yang lahir dari perkawinan budak dan tuannya menjadi anak merdeka. Untuk menghilangkan ketidakadilan ekonomi Islam mendorong umatnya, baik melalui kewajiban seperti zakat maupun ajaran sunnah seperti infaq dan sadaqah untuk mewujudkan distribusi ekonomi, dan akhirnya sosial, yang lebih adil.

Semangat membangun kemanusiaan atas dasar nilai dan ajaran Islam tentu saja juga dimiliki

para pendukung *khilafah siyasiah*. Bahkan dalam wujud yang lebih kuat dibanding para pengkritiknya. Mereka seringkali merespon lebih cepat dengan membawa bantuan uang dan tenaga setiap kali terjadi bencana yang ada di negeri ini. Tetapi kekuatan kemanusiaan itu tidak akan pernah bisa mewisuda semangat kemanusiaan tertinggi yang diajarkan Nabi karena terjebak dalam prinsip-prinsip kesempitan yang justru dilawan Nabi: “kesempitan kemanusiaan”. Sementara Nabi menekan ego kemanusiaannya sedemikian rupa sehingga memberi ruang bagi kemanusiaan yang lebih luas, para pendukung khilafah justru lebih banyak mengidentikkan gerakannya dengan sukuisme lama yang telah memenjarakan para khalifah yang mengusung sistem khilafah di zaman dahulu. Semangat kenabian untuk melawan kesempitan suku awalnya dipegang teguh oleh para sahabat utama Nabi, setelah itu bertambah hari bertambah pudar.

Para sahabat Nabi tidak melihat Nabi sebagai figur terpenting yang terisolasi dan tidak mengidentikan ajaran yang dibawanya dengan nama Muhammad. Gagal memahami semangat kemanusiaan nabi berdasar pada kemanusiaan yang lebih luas (yang disebut Jamaah) yang impersonal, sebagian penulis Barat pernah menyebut Islam dengan Muhammadanism (pengikut atau pemuja Muhammad). Para pengikut Nabi, terutama pada masa awal Islam, tidak pernah gagal memahami pesan kemanusiaan Nabi yang sangat luas. Walaupun menggunakan kata ‘muhammadiyah’ misalnya dalam nur muhammadiyah, mereka menggunakannya untuk mengungkapkan keagungan Nabi sebagai penghubung semangat kemanusiaan berdasar nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan kepada manusia dalam ruang dan waktu yang berbeda kepada nabi-nabinya dengan umatnya.

Nur muhammad adalah penghubung antar kemanusiaan dalam keragaman ruang dan waktu,

bukan pemutus, dan semangatnya adalah keterhubungan komunal bukan individual. Muhammadiyah yang dijadikan nama gerakan oleh Ahmad Dahlan adalah wujud terbaik dari semangat keterhubungan yang sama dengan yang dilakukan masyarakat muslim pada masa awal Islam. Semangat tauhid yang dibawanya adalah semangat memutus klaim-klaim kemanusiaan yang menutupi keesaan Tuhan. Setelah Tuhan bersih dari klaim-klaim yang dibuat mahkluknya, kini Tuhan menjadi Dzat Yang Maha Terbuka yang bisa didekati semua manusia secara sejajar. Walaupun ada manusia yang mendapatkan anugrah kedekatan denganNya, itu karena ketakwaan kepadaNya. Dan hanya Allah yang tahu siapa, dan karena itu, setelah klaim kedekatan itu dibuat, tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya orang itu. Ketidaktahuan itu mengasumsikan semua orang pada dasarnya sama di hadapan Allah. Dalam perspektif agama sebagai penghubung antara ketuhanan dan kemanusiaan, dan agama

diturunkan untuk kebaikan manusia, maka bagi Ahmad Dahlan, bisa jadi wujud kebaikan terbaik Islam ada dalam wujud kebaikan terbaik bagi sesama manusia, dan hanya akan kokoh jika terhubung dengan keesaan Tuhan yang benar-benar bersih. Dengan kata lain nama Muhammadiyah bukan pemujaan pada nabi Muhammad seperti yang dibayangkan sebagian Barat di awal mereka mengenal Islam melalui tulisan-tulisannya. Bukan juga paham ketuhanan yang menyingkirkan kemanusiaan dalam wujud beragama mereka. Ia adalah semangat kemanusiaan Nabi yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah tertinggi.

Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga sahabat-sahabat lain mewarisi dengan sangat baik semangat kemanusiaan berbasis ilahiyah tersebut. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai titik temu terbaik antara ketuhanan dan kemanusiaan, para sahabat Nabi tidak pernah menyebut diri Muhammad, apalagi diri mereka, sebagai nama sistem

yang dibangunnya. Umar menjadikan hijrah (simbol kekuatan prestasi dan fungsi) sebagai pijakan penanda waktu (kalender), bukan tanggal kelahiran Nabi. Hijrah adalah peristiwa komunal, sementara kelahiran adalah peristiwa individual. Seperti yang diajarkan Nabi, Umar menjadikan komunitas sebagai pijakan, bukan individu. Nama ajaran yang dibawa Nabi bukan Agama Muhammad seperti tercermin dari nama Muhammadanism yang dipakai Barat awal untuk menyebut ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi dengan nama Islam seperti yang ditegaskan dalam al-Quran. Islam adalah semangat keterhubungan komunal dalam sejarahnya yang sangat panjang sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dimana Muhammad adalah penghubungnya.

Sepeninggal Nabi kesempatan sukuisme kembali menguat. Walau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berusaha melawannya, sukuisme semakin menguat terutama setelah Ali terbunuh dan memun-

culkan Muawiyah yang lalu menjadi figur sangat penting di balik konsolidasi kekuatan suku yang sangat sempit di ranah politik. Seperti disinggung di atas, khilafah, yang awalnya lahir dari semangat membangun kemanusiaan atas dasar nilai-nilai ketuhanan (disini disebut *khilafah adamiyah*) di tangan para penerus Muawiyah kini menjadi *khilafah siyasiyah* dengan semangat terbalik: nilai-nilai ketuhanan dipakai untuk menekan kemanusiaan melalui politik.

Pada konteks Nusantara, jauh sebelum kedatangan agama Islam, kawasan ini telah banyak berdiri berbagai kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu sebagian menganut agama Hindu, dan sebagian yang lain menganut agama Buddha. Yang menarik, di antara sebagian pemimpin kerajaan di Nusantara

itu bahkan ada yang menyatukan agama Hindu dan Buddha, sehingga dikenal sebagai Shiwa-Buddha. Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman historis masyarakat Nusantara dalam konteks relasi negara dengan agama, adalah hubungan harmonis antara negara dan agama, sehingga membawa implikasi yang luas bagi warga negara, yakni terciptanya harmoni sosial di kalangan warga. Oleh karena itu, dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, nyaris tidak pernah ditemukan konflik sosial yang dipicu oleh agama. Kalau pun terjadi konflik di antara elite kerajaan, atau bahkan konflik antarkerajaan, maka hal itu dapat dipastikan karena motif ekonomi-politik, bukan motif agama.

Seiring masuk dan penerimaan agama Islam yang luas di Nusantara, banyak kesultanan

... khilafah, yang awalnya lahir dari semangat membangun kemanusiaan atas dasar nilai-nilai ketuhanan (disini disebut *khilafah adamiyah*) di tangan para penerus Muawiyah kini menjadi *khilafah siyasiyah* dengan semangat terbalik: nilai-nilai ketuhanan dipakai untuk menekan kemanusiaan melalui politik.

atau kerajaan Islam berdiri, seperti di Aceh, Palembang, Demak, Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Meskipun disebut sebagai kerajaan atau kesultanan Islam, tidak ada satu pun di antara kerajaan-kerajaan Islam tersebut yang menganut sistem khilafah. Sebaliknya, yang terjadi justru kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu menganut sistem monarki (*mamlakah*).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam situasi normal terjadi suksesi kepemimpinan kerajaan, maka yang berlaku adalah pewarisan tahta kerajaan oleh seorang raja pengganti karena pertimbangan darah atau genealogi, sebagaimana umumnya yang berlaku menurut hukum kerajaan. Meskipun demikian menganut sistem *mamlakah*, sebagian raja-raja Islam di Nusantara menyematkan gelar atau predikat khalifah, seperti yang terlihat pada gelar Raja Mataram Islam dan sebagian Sultan Melayu. Berkaitan dengan itu, bagi sebagian raja Islam di kawasan Nusantara, khalifah

tidak dimaknai sebagai gelar atau predikat yang menunjukkan bahwa dirinya adalah penganut sistem khilafah, sehingga menjadi pemimpin tunggal yang melampaui batas-batas kebangsaan yang ada dunia, tetapi lebih menunjukkan fungsinya sebagai pengemban tugas pengayoman bagi kehidupan keagamaan di kerajaan yang dipimpinnya. Apa yang dilakukan oleh raja-raja Islam tersebut semakin menunjukkan kesadarannya bahwa khilafah sebagai sistem politik bukan kewajiban agama yang harus ditegakkan, melainkan sekadar fungsi kepemimpinan agama yang harus dijalankan.

Di luar konteks politik Islam di Nusantara, penggunaan istilah khalifah di kalangan muslim Nusantara juga digunakan untuk menunjukkan fungsi keagamaan yang harus dijalankan oleh seorang muslim dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam hal ini khalifah adalah orang yang memiliki kualitas moral dan intelektual, sehingga layak dijadikan guru panutan bagi masyarakat.

Melihat penggunaan pemaknaan istilah khalifah yang berbeda-beda di kalangan muslim Nusantara, baik dari kalangan elite kerajaan maupun elite keagamaan, tampak bahwa makna khalifah ada yang bermakna politis dan ada yang moral-intelektual. Meskipun ada makna politisnya, tetapi makna politis tersebut berkaitan dengan tugas seorang raja Islam dalam memimpin pemerintahannya yang harus mengayomi kehidupan keagamaan kerajaannya. Dengan demikian, perbedaan pemaknaan terhadap khalifah tersebut semakin menunjukkan bahwa khilafah sebagai sistem politik di kalangan muslim Nusantara bukan merupakan kewajiban agama.

APAKAH PEMERINTAH INDONESIA ITU DIKATAKAN *TĀGHŪT*?

Pemerintah Indonesia sendiri jelas bukanlah *tāghūt*. Pertama, *tāghūt* secara bahasa berarti ‘setan’, ‘dukun’, dan ‘segala hal yang melampaui batas’. Qur’an dan hadis tidak pernah merujuk arti *tāghūt* untuk sebuah sistem pemerintahan. Belakangan sebagian kelompok beragama dari kalangan umat Islam memaknai *tāghūt* untuk sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut tafsiran mereka. Kedua, hampir sebagian besar ajaran Islam diakomodasi oleh pemerintah Indonesia.

Melihat penggunaan pemaknaan istilah khalifah yang berbeda-beda di kalangan muslim Nusantara, baik dari kalangan elite kerajaan maupun elite keagamaan, tampak bahwa makna khalifah ada yang bermakna politis dan ada yang moral-intelektual.

Kemudian, bila kita melirik kajian hukum Islam, itu terbagi dalam empat tema besar; *munākahāt*, *muāmalah*, *‘ibadah*, dan *jināyah*. Tiga hukum sudah diatur di dalam UU negara. Tak ada yang alfa dari negara. Sedangkan *jināyah*, ini yang masih dalam penyempurnaan. Jadi secara umum, syariat Islam di Indonesia sudah dijalankan secara formal dan informal. Oleh karena itu, tidak ada alasan menyebutkan Indonesia sebagai negara *kufar*, *tāghūt*, dan negara *jāhiliyah*.

APAKAH NEGARA INDONESIA SUDAH BERLANDASKAN HUKUM ISLAM?

Syekh Ba’lawi menyebutkan bahwa definisi negara Islam cukup longgar, dan Indonesia terbi-
lang negara Islam. Beliau menuliskan:

“Setiap tempat atau wilayah di mana seorang muslim yang tinggal di sana mampu mempertahankan diri dari musuh-musuh yang meranginya dalam suatu masa, maka wilayah

tersebut telah menjadi Negara Islam, di mana di sana hukum-hukum Islam diberlakukan maupun setelahnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar Tanah Jawa adalah Dār Islām karena umat Islam pernah menguasainya sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir [Ba’alawi, (Beirut; Dar Al Fikr, 1194), hlm. 254].”

Di Indonesia hukum Islam sudah diberlakukan, meskipun belum sempurna. Misalnya, dalam konteks ibadah haji sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Begitu pun tentang masalah puasa ramadhan, shalat, zakat, dan amal lainnya. Begitu pun masalah muamalah sudah dipraktikkan di Indonesia. Bahkan, bank-bank Islam sudah merebak di Republik ini.

Selain itu, Indonesia memang bukan sepenuhnya negara Islam, walaupun penduduknya mayoritas adalah muslim. Negara Indonesia didirikan

berlandaskan Pancasila dan UDD 1945. Walaupun tidak berlandaskan hukum Islam, ajaran utama umat Islam yang tergambar dalam rukun Islam yang 5 itu semuanya dapat dilakukan umat Islam secara merdeka.

BAB 5 | **BENARKAH MODERASI BERAGAMA DICIPTAKAN OLEH BARAT?**

Ada yang bilang bahwa moderasi beragama diciptakan oleh Barat. Pertanyaan ini bisa saja benar, tapi kelihatannya lebih banyak tidak tepatnya. Bahwa moderasi beragama digunakan oleh Barat sebagai alat, jawabannya adalah iya. Tapi bila moderasi beragama diciptakan secara sengaja oleh Barat, maka jawabannya tidak. Bagian ini berupaya menjawab tuduhan-tuduhan selama ini yang mengatakan bah-

wa moderasi beragama adalah ciptaan Barat untuk memecah belah umat Islam di dunia.

APAKAH MODERASI BERAGAMA ADALAH ALAT BARAT UNTUK MENGONTROL DAN MENGUASAI ISLAM?

Jawabannya betul bahwa moderasi beragama sudah, sedang, dan akan dijadikan alat untuk menguasai Islam dan masyarakat muslim. Barat adalah simbol kekuasaan politik dan ekonomi yang

berusaha mengontrol dunia termasuk dunia Islam. Sebagai simbol dia bisa mewujud dalam berbagai bentuknya termasuk plutokrasi dan oligarki beserta antek-anteknya (kekuasaan politik dan ekonomi Amerika dan Cina beserta para pendukung beratnya yang ingin mengeruk kekayaan alam kita semata tanpa peduli dengan masa depan kita). Kelompok moderasi beragama sadar tentang penggunaan dirinya oleh kelompok lain untuk mencapai tujuannya, dan itu tidak bisa dihindari oleh kelompok manapun dalam konteks pertarungan kekuasaan. Siapapun akan menggunakan siapapun untuk kepentingan dirinya, dan kelompok moderasi agama, atau kelompok manapun yang sadar diri, harus berusaha melawannya dengan cara memasuki pertarungan yang tengah dihadapi para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sifat dasar penguasa, baik penguasa ekonomi maupun penguasa politik, adalah mengumbar hawa nafsu dalam mempertahankan kekuasaan-

nya dengan menggunakan segala cara. Keserakahan ini tidak mengenal etika, dan karena itu agama, yang menjadi rumah besar etika, adalah musuh utamanya. Persis seperti Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy memusuhi Nabi karena Nabi mengajarkan etika tingkat tinggi: hidup ini adalah amanah yang harus dijaga dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Alam semesta ini diciptakan untuk manusia dan manusia harus menjaganya sepenuh hati dan nanti di akhirat harus mempertanggungjawabkannya. Hidup ini adalah titipan Tuhan yang juga harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam pertanggungjawaban ini ada akuntabilitas dan ada catatan detail yang berisi amal dan perbuatan yang akan dibacakan, lalu akan ada perhitungan dan pengadilan. Lalu akan diputuskan apakah dia masuk neraka atau surga. Keduanya abadi.

Supaya adil, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Mau kafir, melanggar larangan, silahkan.

Kelompok moderasi beragama sadar tentang penggunaan dirinya oleh kelompok lain untuk mencapai tujuannya, dan itu tidak bisa dihindari oleh kelompok manapun dalam konteks pertarungan kekuasaan. Siapapun akan menggunakan siapapun untuk kepentingan dirinya, dan kelompok moderasi agama, atau kelompok manapun yang sadar diri, harus berusaha melawannya dengan cara memasuki pertarungan yang tengah dihadapi para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Mau iman, mengikuti perintah, juga silahkan. Mau menjaga alam semesta dengan baik sebagai titipan Allah, dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kesejahteraan manusia di muka bumi, silahkan. Atau mau mengeksploitasinya untuk memuaskan keserakahannya, walaupun dengan cara merusak alam, memiskinkan orang-orang yang semestinya juga mendapatkan manfaat dari alam yang diciptakan Tuhan untuknya, juga silahkan. Nabi dan para pengikutnya adalah orang-orang yang menjaga teguh amanat ini. Kebebasan yang diberikan, karena sadar akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, akan dimanfaatkannya untuk mewujudkan kebaikan; sementara Abu Jahal

berusaha memanfaatkan kebebasannya ini untuk mewujudkan semua hawa nafsunya. Yang penting dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia akan melakukan segala cara (merusak lingkungan, menyuap, melawan hukum, menyakiti, bahkan membunuh manusia) untuk memupuk kekayaan dan kekuasaan.

Ada dua hal utama yang dilawan Abu Jahal. *Pertama*, konsep keesaan Tuhan; *kedua*, pembalasan di hari akhir. Kedua ide ini telah membelenggu keserakahannya mengakumulasi harta dan kekuasaan yang diinginkannya. Keesaan Tuhan telah meletakkan manusia sejajar, karena hanya Tuhan yang Maha segala-galanya. Semua manusia sama,

terbuat dari tanah dan turunan Adam. Klaim suku Quraisy sebagai suku terbaik, hilang digantikan dengan kesejajaran semua manusia. Kesejajaran yang membuat semua orang terbuka untuk mewujudkan potensi dirinya. Akumulasi kekayaan dan kekuasaan yang awalnya dimonopoli Quraisy kini bisa diakses semua orang, termasuk Bilal dan Ammar b. Yasir.

Abu Jahal juga tidak senang dengan ajaran adanya pembalasan di hari akhir. Ide inilah yang telah menciptakan ketakutan yang luar biasa karena kini kejahatan ekonomi dan politik terhadap sesama manusia yang dinikmatinya di Jaman Jahiliyah akan berakhir. Sementara awalnya dia menikmati kebebasan menyakiti atau merampas hak politik dan ekonomi orang akibat keserakahannya, kini hilang, karena *pertama*, akan selalu ada Nabi dan pengikutnya yang selalu mengingatkan bahkan mencegahnya; *kedua*, kejahatannya itu nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Allah sesu-

dah mati. Kematian yang diyakini masa jahiliyahnya atas dasar “lakukan segalanya, mumpung masih hidup”, kini hilang digantikan “waspadaai segala amal dan perbuatan, dan pastikan melakukan segalanya dengan adil dan mendatangkan kebaikan untuk banyak orang.” Hal ini telah membuat Abu Jahal merasa lelah hidup dan tak leluasa lagi. Nabi pun akhirnya dilawannya.

Yang juga dilawan adalah ajaran berbagi kekayaan. Dia merasa bahwa semua kekayaan yang didapatkannya adalah miliknya. Keuntungan dagang akan dijadikan modal lagi untuk berdagang lagi. Terus terakumulasi begitu sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya dan paling berkuasa. Kekayaanlah yang membuatnya bisa membeli segalanya, termasuk membeli orang lain untuk menggantikan kewajibannya membela kepentingan Quraisy yang diganggu orang-orang Islam di Madinah. Setelah Nabi datang, ada kewajiban zakat, infaq, sadaqah, memerdekakan budak,

dan amal saleh lainnya yang akan berakibat pada berkurangnya kekayaan yang dia dapatkan secara susah payah. Bagi orang-orang Mukmin, berbagai kekayaan adalah bagian dari persiapan berbekal diri dengan amal baik sebanyak-banyaknya agar nanti di akhirat disayang Tuhan. Bagi Abu Jahal itu adalah pemiskinan yang akan menyengsarakan dirinya.

Abu Jahal adalah simbol keserakahan politik dan ekonomi yang menjadikan agama sebagai musuh besarnya. Semua lembaga (baik lembaga ormas, lembaga pendidikan, maupun lembaga politik) dan tokoh-tokohnya (para ulama, pendidik dan aktifis) adalah musuh bebuyutannya karena mereka akan selalu mengganggu kepentingan politik dan ekonominya dengan nilai-nilai kebaikan yang akan membelenggunya. Para penguasa itu akan menggunakan segala cara, memanfaatkan segala celah yang ada sekecil apapun, untuk menghancurkan. Dalam konteks ini, moderasi beragama

adalah celah terbuka di kalangan komunitas agama yang bisa dipakai untuk menghacurkannya. Tentu banyak sekali celah lain, termasuk perbedaan pandangan dan pendapat antar kelompok agama. Perbedaan antara Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Salafi, Wahabi, misalnya, akan segera dimasuki dan dibesar-besarkan agar kekuatan agama terus melemah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi musuh kuat yang bisa melawan kekuasaannya.

Para penguasa politik dan ekonomi dengan sendirinya akan bekerja sama, saling memanfaatkan untuk kepentingan yang sama: mempertahankan kekuasaan. Kerjasama ini akan melahirkan kekuatan yang luar biasa besarnya yang akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya: memenjarakan para aktifis pembela kepentingan rakyat, menyuap para pembuat kebijakan dan undang-undang, merusak hutan, menyengsarakan rakyat kecil, membiayai para penguasa agar terjatuh hutang akibat biaya politik yang sangat

mahal, mempertahankan sistem pemilihan yang bisa terus memberi ruang untuk melestarikan kepentingan kekuasaannya, dan lain-lain. Bagi para penguasa ekonomi dan politik yang serakah, moderasi beragama bisa dipakai untuk melestarikan kekuasaan. Segera para kelompok pendukung moderasi beragama diseterukan dengan kelompok lain (dengan NU, Muhammadiyah, Aswaja, Salafi, Wahabi). Cara yang terbaik adalah dengan mengasosiasikan kelompok moderasi beragama dengan kelompok-kelompok yang menjadi musuhnya: Liberalisme, Syiah, Yahudi, Zionis, plutokrasi, Komunisme, sekularisme dan lain-lain. Berbagai media (koran besar, kecil, WA grup, YouTube, Instagram, dan apapun yang tersedia) dimanfaatkan untuk membangun hubungan permusuhan dan perpecahan di antara komunitas agama, baik agamanya Islam, Yahudi Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu, apapun. Bagi para penguasa politik ekonomi yang serakah ini, apapun bisa dipakai se-

panjang bisa memuaskan dan melestarikan hawa nafsu mereka.

Sekali lagi moderasi beragama adalah sikap kritis dan terbuka untuk melihat keragaman sebagai kekuatan yang harus kita olah untuk mewujudkan tujuan agama: mengabdikan nilai-nilai ketuhanan untuk kebaikan manusia dan alam yang melingkarinya. Sikap kritis yang terbuka ini harus dipraktekkan secara adil kepada semua keragaman tradisi, budaya, ilmu dan peradaban, baik pada nilai-nilai yang ada di dalamnya, maupun pada lembaga atau individu yang bekerja untuk menjaga tradisi, budaya, ilmu dan peradaban itu. Konstruksi ilmu—baik ilmu agama maupun ilmu umum beserta komunitas, lembaga, tokoh yang membangunnya—juga harus dikritik agar tumbuh lebih kuat dan lebih luas. Tanpa kekuatan kritik dan keterbukaan tidak akan ada pertumbuhan ilmu, tradisi, budaya dan peradaban. Para penguasa ekonomi dan politik sangat alergi terhadap segala jenis

kritik, kecuali kalau kritik itu diarahkan kepada lawan-lawannya atas nama kebebasan dan pertumbuhan peradaban. Mereka akan menunggangi apapun untuk kepentingannya.

Dari sisi pertarungan keragaman kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi yang ada di Indonesia ini, moderasi beragama adalah sikap peduli kepada kepentingan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan utama Islam dengan cara memasuki pertarungan itu. Sikap pasif bukan pilihan posisi moderasi beragama. Kalau moderasi beragama adalah usaha menemukan titik temu terbaik dari keragaman pertarungan kepentingan di negeri ini, demi menjaga kepentingan masyarakat kebanyakan, yang harus dilakukan para pendukungnya adalah melihat secara kritis

setiap kekuatan yang sedang bertarung lalu, dalam pertarungan itu, posisi mana yang menentukan masyarakat terbanyak. Masyarakat terbanyak dijadikan tujuan utama karena memang itulah yang diajarkan Rasul bahwa sebaik-baik orang Islam adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi kebanyakan manusia. Aqidah Ahlussunnah waljamaah yang jadi pijakan moderasi beragama akan selalu menjadikan Sunnah Nabi sebagai rujukan untuk membangun masyarakat terbanyak (*jamaah*).

Menyadari bahwa memasuki pertarungan berbagai kepentingan yang tengah terlibat, moderasi beragama akan berhadapan dengan semua kekuatan, yang dengan segala cara, menjadikannya sebagai bagian dari kepentingan kekuasaan

Sekali lagi moderasi beragama adalah sikap kritis dan terbuka untuk melihat keragaman sebagai kekuatan yang harus kita olah untuk mewujudkan tujuan agama: mengabdikan nilai-nilai ketuhanan untuk kebaikan manusia dan alam yang melingkarinya.

annya (baik dengan cara memberikan dukungan ekonomi dan politik, maupun dengan dukungan lainnya). Kalau cara ini tidak berhasil, maka dia akan berusaha menjadikan moderasi beragama sebagai musuh bersama yang harus dilawan ramai-ramai. Termasuk oleh orang-orang yang justru sedang dibelanya. Perlu keberanian dan kekuatan untuk berada mengambil posisi moderasi beragama. Kalau tidak memiliki keberanian dan kekuatan ini, pertarungan kekuasaan politik dan ekonomi akan dihadapi dengan cara melawannya dari luar dan tidak akan efektif. Kalau diibaratkan pertarungan tinju, moderasi beragama akan ada di dalam ring tinju dan melawan musuhnya dengan cara dan aturan yang disepakati dalam pertarungan itu. Kalau yang menjadi lawan bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan tertinggi yang menjadi tujuan agama itu adalah demokrasi, maka demokrasi yang akan menjadi lawan moderasi beragama. Kalau yang menjadi lawannya adalah khilafah, maka

khilafah akan menjadi lawannya. Semua lembaga, kepentingan, kekuasaan yang berusaha merusak kebaikan kemanusiaan dan alam semesta yang menjadi tujuan utama agama akan menjadi lawan moderasi beragama. Membela kemanusiaan tidak sama dengan memuja manusia, yang terputus dari ketuhanan yang telah menciptakannya. Moderasi beragama justru menjadi proyek besar mempertemukan kembali nilai-nilai agama yang luhur yang sudah diputus hubungannya dengan nilai-nilai ketuhanan.

Berada di tengah-tengah keragaman pertarungan kekuatan, antara kelompok-kelompok sosial, politik, budaya dan agama, moderasi beragama ada dalam posisi yang sangat riskan. Kalau berhasil menemukan titik temu terbaik untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, maka posisi tersebut akan berhimpitan dengan semua kepentingan yang tengah bertarung itu, dan masing-masing merasa memilikinya. Perlu kedewa-

saan, kecerdasan dan kekuatan nurani di dalam kelompok-kelompok yang bertarung untuk melihat sisi terbaik dari moderasi beragama. Mereka bahkan harus ikut menjaga benang yang lebih tipis dari benang dibelah tujuh sekalipun agar tidak putus karena itulah penghubung yang dimiliki untuk menjaga agar alam dan manusia tidak dikorbankan terlalu banyak. Merasa ikut menjaga benang yang sangat tipis itu agar tidak putus, masing-masing akan mengklaim bahwa karena dirinyalah benang itu tidak putus. Karena jumlah yang ikut menjaganya banyak, dan bisa jadi semuanya sesungguhnya saling memusuhi, atau masing-masing memiliki banyak musuh, maka keterhubungan antara moderasi dengan semua kelompok yang bertarung itu akan berhadapan dengan semua kelompok yang menjadi korban dari kerakusan kekuasaan kelompok itu, maka semuanya akan menjadi musuh bersama.

APAKAH MODERASI BERAGAMA ADALAH PROYEK BARAT UNTUK MELEMAHKAN AKIDAH ISLAM?

Ada anggapan bahwa moderasi beragama bersumber dari Barat untuk melemahkan akidah Islam. Moderasi beragama juga dianggap sebagai sebuah upaya untuk menghancurkan Islam secara sistematis. Bahkan, ada anggapan lain bahwa moderasi beragama adalah senjata baru Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, untuk menjauhkan masyarakat muslim dari agamanya. Apapun itu, jawabannya bisa jadi. Sebagai sebuah gerakan, moderasi bisa jadi alat bagi siapapun. Namun, kami punya penjelasan lain untuk menjawab pertanyaan ini.

Moderasi beragama, terutama dalam hal ini dalam konteks agama Islam, merupakan gerakan global untuk menjernihkan pandangan-pandangan Islamofobia. Mengapa harus dijernihkan? Karena Islamofobia menjadi salah satu ketakutan yang muncul pasca 9/11 di tengah masyarakat Barat.

Berbagai kalangan muslim sudah berupaya agar gerakan moderasi beragama, atau dalam konteks ini moderasi Islam, agar upaya-upaya semacam ini menjadi gerakan global yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Bahkan beberapa elemen di Barat turut membantu memberikan citra yang “baik dan damai” dari Islam, terutama untuk mengkonter citra Islam yang selama ini dianggap sebagai agama kekerasan atau agama teror.

Salah satu kajian akademik mengenai moderasi Islam bahkan telah dipublikasi oleh Prof. Mohammad Hasyim Kamali pada 2015. Kamali adalah seorang pakar hukum Islam dari Afghanistan dan sudah terkenal di dunia internasional. Bukunya yang berjudul *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasathiyah* meneliti konsep moderasi (*wasathiyah*) secara komprehen-

sif dan bagaimana bentuk aktualisasinya di masyarakat. Salah satu niat utama Kamali menulis ini supaya para pemuka agama, dalam hal ini ulama, lebih fokus mendorong mayoritas muslim yang selama ini diam (*silent majority muslim*) atas kasus-kasus kekerasan di tengah komunitas muslim agar mau bersuara. Selama ini, kebijakan yang ada terlalu fokus pada kelompok ekstrem dalam Islam, sehingga menimbulkan kesan bahwa penganut Islam secara umum adalah orang-orang ekstremis. Sementara, fakta sesungguhnya bahwa mayoritas muslim adalah orang-orang yang damai, bijak, dan menolak praktik kekerasan yang selama ini dipertontonkan misalnya oleh ISIS.

Lebih jauh, Kamali juga mengeksplorasi wasathiyah baik secara historis, konseptual, maupun praktis. Dengan menelusuri definisi dan ruang

Moderasi beragama, terutama dalam hal ini dalam konteks agama Islam, merupakan gerakan global untuk menjernihkan pandangan-pandangan Islamofobia.

lingkup konsep dari sumber-sumber dasar Islam, Al-Qur'an dan Hadits, Kamali juga memperlihatkan bahwa *wasatiyyah* memiliki sejarah panjang dan berkembang dengan baik dalam hukum Islam. Maka, menerapkan konsep tersebut pada isu-isu kontemporer kebijakan global, seperti keadilan, hak-hak perempuan, keseimbangan lingkungan dan keuangan, dan fenomena globalisasi oleh seorang muslim jelas menjadi sebuah keniscayaan.

Karya Kamali bahkan melawan formulasi panjang selama beberapa dekade dari tesis “benturan peradaban” atau “*clash of civilization*” yang dibunyikan oleh Samuel Huntington. Menurut Kamali, pandangan Huntington ini destruktif dan menimbulkan retorika di publik tentang ketakutan akan ekstremisme muslim sejak serangan 11 September 2001. Meski demikian, Kamali juga mencoba memaparkan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi “penyakit budaya” di dunia muslim.

Upaya Kamali ini merupakan buah panjang dari perjuangan muslim lainnya yang ingin mencitrakan diri mereka sebagai kalangan yang moderat (*wasatiyyah*). Upaya-upaya semacam ini, sebagaimana bisa dibaca lebih lanjut dalam buku *Akar Persoalan Kebangsaan: Jawaban Moderasi Beragama* (2021), misalnya tercermin dari langkah Abdurrahman Wahid (Gusdur) dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Ahmad al-Tayyib Grand Syekh Al-Azhar di Kairo, dan juga upaya-upaya dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 2014.

Oleh karena itu, tuduhan bahwa moderasi beragama adalah proyek Barat untuk menghancurkan Islam adalah tidak tepat. Moderasi beragama, terutama moderasi Islam, adalah upaya agar umat Islam bisa mencitrakan dirinya sebagai umat yang baik dan umat yang juga bisa berkontribusi luas untuk masyarakat dunia. Selain itu, moderasi Islam juga menjadi upaya bersama bagi seluruh umat Islam untuk bersatu dan menuju kemasl-

hatan, justru bukan untuk tuduh-menuduh satu sama lain. Moderasi beragama menjadi perekat tidak hanya untuk umat Islam dengan umat agama lainnya, tapi juga menjadi pemersatu di internal umat Islam.

APAKAH MODERASI BERAGAMA BAGIAN DARI LIBERALISME?

Kalau liberalisme itu diartikan sebagai paham atau pemikiran yang bersikap terbuka, dimana semua hasil pikiran dan perenungan manusia baik terhadap Qur'an (ayat quraniyah), alam (ayat kauniyah), dan manusia (ayat insaniyah) disikapi secara kritis, maka moderasi beragama adalah bagian dari liberalisme itu. Karena manusia terbatas, maka apapun yang dihasilkannya, termasuk tradisi dan budaya, ilmu dan peradaban, pasti terbatas. Bangunan sebuah tradisi, budaya, ilmu dan peradaban sangat dipengaruhi oleh alam, tantangan dan latar belakang manusia yang membangunnya. Masing-masing Imam mulai dari Maliki, Hanafi,

Hanbali dan Syafi'i memiliki bangunan keilmuan hukum Islam (fiqh) yang berbeda satu sama lain. Sementara Imam Malik memberi ruangan yang lebih besar bagi tradisi atau amal, atau Sunnah Nabi seperti yang diamalkan di Madinah, Imam Hanafi lebih menitikberatkan pada akal, dan Imam Ibn Hanbal pada Sunnah Nabi seperti yang tersimpan dalam Hadith, Imam al-Syafii'i pada usaha untuk mempertemukan ketiganya (amal Madinah, akal, dan Sunnah Nabi). Demikian juga dalam ilmu kalam. Ibn Hanbal, al-Jubai (tokoh Mutazilah), dan al-Asyari membangun keilmuan kalam yang berbeda. Sementara Ibn Hanbal (yang terkenal dengan sebutan Ahl al-Hadits) lebih memberikan ruang yang sangat besar pada Hadits dan al-Jubai melakukan kebalikannya (memberi ruang yang sangat besar pada akal), al-Asyari berusaha mempertemukan wahyu (yang ada dalam Qur'an dan Hadits) dengan akal (seperti yang digunakan para ahli kalam dan filsafat).

Moderasi beragama adalah sikap terbuka terhadap pilihan-pilihan itu. Bangunan yang dibuat para imam itu tidak akan cocok bagi semua orang. Dengan kata lain, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dirinya, ada orang yang merasa lebih pas dengan rumah ilmu fiqh yang dibangun Imam Malik, sementara yang lainnya dengan rumah ilmu yang dibangun Imam Hanafi, atau Imam Ibn Hanbal atau Imam al-Syafi'i. Demikian juga dalam kalam. Ada yang merasa lebih pas dengan bangunan ilmu kalam yang dibangun Ibn Hanbal, sementara yang lainnya dengan yang dibangun al-Jubai atau al-Asyari. Ibarat pakaian, ada orang yang memilih baju yang sangat tebal berlapis, kadang terbuat dari kulit beruang, karena tinggal di daerah bersalju yang sangat dingin, tapi ada juga orang yang berpakaian selapis saja karena tinggal di daerah dengan sinar matahari yang sangat terik. Moderasi beragama, dalam kiasan ini, adalah sikap yang memberikan ruang bagi semua orang untuk

berpakaian sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Dan boleh juga membuat baju yang dijahit sendiri dengan model sendiri. Yang penting pakai baju. Kalau sikap kebebasan memilih rumah ilmu, baik dalam fiqh, kalam, atau sufisme dan filsafat, disebut liberalisme, maka moderasi agama adalah liberal itu.

Kalau liberalisme dipahami sebagai pemujaan pada rasionalitas, yaitu penggunaan akal sebagai satu-satunya penentu sistem nilai, hukum, dan ajaran agama yang dianut manusia, maka moderasi beragama sama sekali bukan liberalisme. Moderasi beragama adalah lawan terbaik dari liberalisme karena ia sama sekali tidak menggunakan akal sebagai satu-satunya sumber pilihan dan kebenaran, apalagi memujanya. Meletakkan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, dengan akal yang berada dalam kemanusiaannya itu, tidak sama dengan pemujaan pada manusia (atau bisa kita sebut humanisme sekuler). Humanisme sekuler telah memu-

tus hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan pemutusan hubungan ini akan menjebak pada pemujaan manusia. Pemujaan yang hanya bisa diwujudkan dengan membunuh Tuhan yang telah menciptakannya. Pemujaan pada manusia akan melahirkan pemujaan pada akal. Dalam kurikulum pendidikan kita, produk akal, termasuk ke dalamnya adalah ilmu-ilmu umum seperti matematika dan fisika, akan menjadi pujaan bahkan pemujaan baru, Tuhan baru, sementara ilmu-ilmu agama akan dimasukkan ke dalam kategori di luar pujaan atau pemujaan yang bisa disebut berhala yang harus disingkirkan. Lalu kitapun memasuki dunia terbalik dimana ilmu dijadikan Tuhan yang harus dipuja, sementara Tuhan yang menjadi sumber

ilmu dan pencipta manusia dianggap berhala yang harus disingkirkan, karena dianggap benda mati yang tidak memberi manfaat.

Pembunuhan Tuhan di dunia ilmu—terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi—lahir sebagai perlawanan terhadap komunitas agama yang memahami Tuhan sebagai membunuh pertumbuhan ilmu karena permusuhannya pada kemanusiaan dan akal. Ilmu-ilmu produk akal, terutama filsafat dan kalam, pernah dimusuhi bahkan dibunuh oleh komunitas dan lembaga agama. Ilmu-ilmu modern (matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang kita sebut ‘ilmu umum’) dianggap sebagai bukan Islam dan

Kalau liberalisme dipahami sebagai pemujaan pada rasionalitas, yaitu penggunaan akal sebagai satu-satunya penentu sistem nilai, hukum, dan ajaran agama yang dianut manusia, maka moderasi beragama sama sekali bukan liberalisme. Moderasi beragama adalah lawan terbaik dari liberalisme karena ia sama sekali tidak menggunakan akal sebagai satu-satunya sumber pilihan dan kebenaran, apalagi memujanya.

tidak sepenuhnya bisa diterima, walaupun awalnya ilmu-ilmu itu lahir dan tumbuh pesat justru di Rahim Islam pada masa klasik (yang membentang dari abad ke-7 saat Nabi lahir sampai abad 15 saat Cordova jatuh). Lalu kita sibuk mencari cara bagaimana mengislamkannya. Seperti mengislamkan anak yang lahir dari seorang muslim.

Ilmu-ilmu umum yang awalnya tumbuh dari keluarga Islam lalu diambil dan dibesarkan Barat yang sesungguhnya sangat antipati pada agama mereka sendiri karena sikapnya yang anti ilmu. Ilmu umum yang tadinya menyatu dengan ilmu agama, lalu dipisahkan dan dibesarkan dalam semangat anti agama ini, melahirkan ilmu yang sekarang kita sebut peradaban Barat, yang ilmunya kini diajarkan di perguruan tinggi-perguruan tinggi terbaik di dunia, tempat anak-anak terbaik Islam meneruskan studinya. Moderasi beragama pada dasarnya adalah semangat untuk kembali ke Islam klasik saat masyarakat Islam awal tumbuh

dengan semangat terbuka dan kritis dimana keragaman ilmu dan peradaban dirayakan dan dijadikan kekayaan yang diolah dengan prinsip-prinsip keisaman yang diajarkan Rasul.

Karakter kritis dan terbuka yang diajarkan Rasulullah lalu perlahan mati ketika peradaban yang dihasilkan hancur di tangan Eropa, lalu masyarakat Islam terputus dari tradisi dan kekayaan dunia. Dunia yang bukan hanya kekayaan dunia yang melahirkannya tetapi juga kekayaan dunia yang dilahirkannya. Keterisolasian ini melahirkan sikap waspada dan curiga yang berlebihan terhadap Barat yang telah menghancurkan mereka. Kecurigaan yang dialamatkan bukan hanya kepada masyarakat Barat tetapi dengan semua produknya termasuk ilmu dan peradaban. Karena ilmu dan peradaban lahir dari kemanusiaan yang kreatif, maka yang dicurigai dan dimusuhi juga adalah manusianya, baik di Barat maupun di Timur (yang juga menjadi produk Barat), termasuk lembaga-lembaga pendidik-

an maupun produknya. Semangat Islam sebagai titik temu antara ajaran para nabi terdahulu, beserta tradisi, budaya, ilmu dan peradaban yang dihasilkannya, beserta sikap kritis dan terbuka yang menjadi sikap dasarnya, kini hilang.

Moderasi beragama menolak pemujaan pada manusia yang terputus dari Tuhannya, juga menolak pemujaan Tuhan yang terputus dari kemanusiaannya. Keterputusan dari salah satunya akan melahirkan ekstremisme dalam beragama.

APAKAH MODERASI BERAGAMA ADALAH PROYEK LANJUTAN DARI LIBERALISME, SEKULARISME, DAN PLURALISME?

Moderasi beragama bukanlah proyek lanjutan dari liberalisme, sekularisme, maupun pluralisme. Ketiga paham ini jelas berbeda dengan moderasi

beragama. Moderasi beragama jelas tidak berupaya meliberalisasi keyakinan seseorang atas kebenaran suatu agama maupun cara beragamanya, memisahkan keberagamaan seseorang dengan negara, dan mencampur-campur keimanan seseorang yang telah diyakini dengan keimanan yang ada pada agama-agama lain. Bahwa moderasi beragama digunakan kelompok-kelompok di luarnya sebagai senjata kata-kata untuk menyebarluaskan pemahaman liberalism, sekularisme, maupun pluralisme, itu bisa saja.

Untuk melerai persoalan ini, *pertama*, mari kita sandingkan antara liberalisme dengan moderasi beragama. Liberalisme adalah pandangan filosofis yang menekankan kebebasan dan persamaan antara individu dalam koridor hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Ia lahir di Eropa seba-

Moderasi beragama menolak pemujaan pada manusia yang terputus dari Tuhannya, juga menolak pemujaan Tuhan yang terputus dari kemanusiaannya. Keterputusan dari salah satunya akan melahirkan ekstremisme dalam beragama.

Moderasi beragama bukanlah proyek lanjutan dari liberalisme, sekularisme, maupun pluralisme. Ketiga paham ini jelas berbeda dengan moderasi beragama.

gai bentuk kritik terhadap pembelengguan terhadap orang-orang yang tidak memiliki status sosial berarti di masyarakat. Di Abad Pencerahan, secara historis, liberalisme menjadi jalan untuk melonggarkan hak-hak istimewa para bangsawan yang selama ini menjadi dalih dalam melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat non-bangsawan. Ini artinya, liberalisme bukan paham yang mengedepankan kebebasan secara urakan atau se-enaknya, sebagaimana dipelintir berbagai kalangan. Sementara dalam moderasi beragama, tidak ada muatan yang menekankan nilai-nilai kebebasan dalam beragama. Justru sebaliknya, beragama harus diletakkan dalam bingkai yang penuh dengan kebijaksanaan. Moderasi beragama juga selalu mementingkan perasaan umat beragama orang lain, tanpa takut keyakinan dan keimanan kita akan tergerus. Moderasi beragama dalam aga-

ma Islam menjadi penghayatan atas ajaran-ajaran yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Ini misalnya terjadi ketika Nabi, sekalipun hatinya sangat sedih karena tidak bisa menolong orang yang dikasihinya, tidak memaksakan keimanannya terhadap pamannya yang tidak ingin masuk Islam sampai akhir hayatnya.

Kedua, sekularisme dan moderasi beragama adalah dua hal yang sama, apakah benar? Lagi-lagi, kita refleksikan sejenak apa yang dimaksud dengan sekularisme, baik secara filosofis maupun historis. Sekularisme merupakan ide tentang segala hal yang tidak religius, atau dalam konteks masyarakat Eropa, dimana istilah ini lahir, adalah tidak terkait sama sekali dengan gereja. Di abad modern, istilah ini awalnya digunakan oleh George Holyoake pada 1851. Istilah ini digunakannya untuk mengganti istilah “ateisme” yang menurutnya agak

menjengkelkan untuk didengar, terutama bagi dirinya yang merupakan seorang agnostik. Sekularisme kemudian digunakannya untuk menggambarkan sikap yang menganjurkan agar hidup harus berlandaskan pertimbangan sekuler, tetapi tanpa harus menolak posisi agama seutuhnya, sehingga hubungan manusia antara orang ateis dengan orang yang beriman tidak terusik.

Pada perkembangannya, terutama dalam hal ini adalah konteks Indonesia, istilah sekularisme selalu dikait-kaitkan tidak pada sekularisme yang dipahami oleh Holyoake. Di masyarakat, asosiasi sekularisme lebih dekat dengan konsep “state secularism”, sebuah konsep pemisahan antara agama dengan negara. Agama dalam hal ini tidak boleh masuk ke dalam ranah pemerintahan atau tidak boleh menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tentu, apa yang dipahami oleh masyarakat tidak salah. Sebab bagaimanapun, konsep sekularisme juga sangat ber-

kaitan dengan pemisahan agama dengan gereja pada konteks Eropa dahulu.

Namun demikian, menjadi aneh bila moderasi beragama dianggap sebagai kebijakan negara untuk memuluskan ideologi sekularisme di Indonesia. Jelas bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler. Berbagai produk hukum yang dibuat selama ini selalu berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Dan moderasi beragama, sebuah kebijakan yang diproduksi oleh negara, juga sudah pasti tidak memisahkan agama dengan negara.

Dalam moderasi beragama justru praktik keberagamaan seseorang penting untuk dipautkan dalam konstitusi. Dalam salah satu indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama, yakni komitmen terhadap kebangsaan, tergambar bahwa justru ada upaya “pengikatan” sikap beragama terhadap konstitusi yang ada di Indonesia. Mempraktikkan agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban seba-

gai warga negara. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan terhadap ajaran agama. Menjadi umat beragama yang shaleh berarti menjadi warga negara yang baik. Ini artinya, sikap beragama seseorang dalam kaca mata moderasi beragama sama sekali tidak terpisah dengan landasan-landasan bernegara.

Ketiga, moderasi beragama dianggap sebagai pengaplikasian ideologi pluralisme di Indonesia. Istilah ini dianggap berbahaya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai kelompok muslim lainnya di Indonesia. Berbahaya karena mereka memahami pluralisme sebagai pluralisme agama, sebuah paham yang menganggap semua agama adalah sama. Paham seperti ini dianggap berbahaya dan menyesatkan, sehingga MUI memutuskan untuk mengharamkan pluralisme agama dan melarang umat Islam menganut paham ini. Berangkat dari pandangan seperti ini, maka tidak menghe-

rankan banyak kalangan menganggap pluralisme agama itu seperti virus yang super berbahaya.

Pluralisme sendiri merupakan paham yang dapat ditemui di berbagai aspek. Secara umum, istilah ini merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan masing-masing. Paham ini juga dapat diartikan sebagai paham untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Sementara itu, pluralisme agama (*religious pluralism*) adalah sikap penerimaan tentang keragaman sistem kepercayaan (agama) yang hidup berdampingan (*co-existence*) dalam satu negara. Ini bukan berarti sikap beragama seseorang diseragamkan atau harus mengikuti upacara maupun ritual keagamaan selain yang dianut oleh seseorang.

Intinya adalah pada penerimaan terhadap yang lain. Menerima, bukan berarti meyakini sebagai sebuah bagian dari keimanan seseorang. Menerima artinya membuka kalbu dan pikiran kepada semua orang, betapapun mereka berbeda dengan kita. Bentuk penerimaan seperti ini pun dicontohkan oleh para Nabi, terutama Nabi Muhammad. Nabi hidup bersama dengan komunitas yang sangat beragam di Madinah. Tapi, bukan berarti Nabi meyakini semua keimanan orang-orang yang non-muslim.

Dalam kaitan tersebut, moderasi beragama bisa saja dikatakan sebagai pluralisme agama dalam pengertian yang sudah diterangkan. Moderasi beragama jelas bukan sebuah bentuk inklusivisme agama, dimana setiap kebenaran agama yang hakiki wajib diakui oleh setiap orang beragama. Moderasi beragama juga bukan upaya untuk meleburkan klaim kebenaran paling valid yang diyakini oleh tiap pemeluk agama. Hal semacam ini sama

sekali tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen terkait moderasi beragama yang sudah dibuat. Mengaplikasikan moderasi beragama berarti menerima bahwa ada penganut agama lain yang hidup di negara Indonesia, dan keberadaan agama-agama di Indonesia sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga, sebagai penutup, moderasi beragama bukan proyek lanjutan atau bagian dari liberalisme, sekularisme, dan pluralisme yang selama ini dipahami masyarakat sebagai ideologi yang “berbahaya” bagi Indonesia.

APAKAH MODERASI BERAGAMA KELANJUTAN DARI, ATAU SAMA SAJA DENGAN, PRIBUMISASI ISLAM DAN ISLAM NUSANTARA?

Ya memang sama. Semuanya berpijak pada semangat menyempurnakan kemanusiaan kita dengan cara menjalankan nilai dan ajaran Allah yang tertinggi dalam kehidupan keseharian mereka. Da-

lam perspektif ini, semua penganut agama harus menghadapi persoalan yang sama. Agama adalah ajaran Tuhan untuk manusia, maka kontestasi (tarik menarik) antara ketuhanan dan kemanusiaan akan selalu menjadi bagian dari beragama. Dalam kontestasi tersebut ada orang yang lebih memilih untuk mendekat ke ketuhanan (mengikuti ajaran agama secara literal dengan cara menekan kemanusiaannya sedalam-dalamnya), ada juga yang memilih lebih dekat dengan wilayah kemanusiaan dengan cara mengeksploitasi semua potensi kemanusiaannya untuk menangkap kebenaran wahyu agar mendapatkan pemahaman yang terbaik untuk kebaikan alam dan manusia. Ada juga orang-orang yang memilih di antara kedua ekstrem itu, yang jumlahnya banyak sekali (bahkan mungkin

tak terhingga) dan setiap posisi memerlukan kesadaran pilihan yang penuh agar bisa beragama dengan baik. Tanpa kontestasi tidak ada kesadaran dan tidak akan ada agama. Kalau manusia disamakan dengan bumi dan ketuhanan dengan langit, maka beragama adalah kontestasi antara langit dan bumi, atau antara akal dan wahyu. Tanpa akal tidak akan ada agama, tanpa wahyu juga tidak akan ada agama. Agama adalah pertemuan antara bumi dan langit, akal dan wahyu.

Kemampuan akal dari seseorang ke orang lain—bahkan pada orang yang sama dari satu usia ke usia lain, dari satu tahapan pendidikan ke tahapan pendidikan lain—akan berbeda dan perbedaan itu akan melahirkan titik temu antara akal dan wahyu yang berbeda pula. Pengalaman batin

Agama adalah ajaran Tuhan untuk manusia, maka kontestasi (tarik menarik) antara ketuhanan dan kemanusiaan akan selalu menjadi bagian dari beragama. pluralisme. Ketiga paham ini jelas berbeda dengan moderasi beragama.

akan berpengaruh pula pada titik temu tadi: setelah selamat dari kecelakaan yang mematikan, misalnya, orang yang awalnya lebih dekat ke bumi akan menjadi manusia yang lebih dekat ke langit. Tetapi orang yang telah berusaha sekuat tenaga mendekati langit untuk satu tujuan tertentu dan tidak berhasil juga, malah jadi bertambah jauh tujuannya, bisa jadi dia akan bergser ke wilayah bumi lebih dekat. Pertemuan akal-wahyu akan terus berubah dari satu titik ke titik lain, tergantung dari perubahan pengalaman, pendidikan, dan tantangan, walau pada orang yang sama, atau pada orang berbeda tetapi ada pada ruang dan waktu yang sama.

Bagi masyarakat yang berpandangan bahwa tugas manusia adalah berserah diri pada nilai, ajaran dan hukum Allah dan menjalankannya sepenuh hati, maka yang harus dilahirkan dalam beragama adalah manusia pasif yang menerima kebenaran secara literal dengan cara menekan

akal dan kemanusiaannya secara terus menerus. Setiap kali mendengarkan ayat Qur'an atau Hadits Nabi, yang harus dilakukan adalah langsung menerimanya tanpa bertanya. Bagi masyarakat agama yang berpandangan bahwa tugas manusia adalah menjalankan nilai dan hukum Allah sebagai manusia ciptaan-Nya, sesuai dengan perubahan usia, tantangan, latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budayanya, maka manusia yang akan dilahirkannya adalah manusia yang sangat aktif. Agar bisa mempertanggungjawabkannya kelak di Hari Akhir, dan juga agar bisa menjelaskannya kepada sesama manusia, baik yang beragama Islam maupun di luar Islam, maka yang diperlukan adalah paham keagamaan yang terbuka dan kontekstual.

Bagi komunitas pro-pasif, tidak ada moderasi beragama karena hukum dan ajaran Islam akan sama dimanapun. Syahadat, shalat, zakat, puasa, haji akan sama dimanapun. Pemberlakuan syariat Islam termasuk rajam bagi para pezinah dan po-

tong tangan bagi para pencuri sama saja dimanapun. Bagaimana bisa menjelaskan dan memaknai syahadat, salat, zakat, dan ibadah haji kepada masyarakat dengan keragaman watak, kecenderungan, latar belakang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya tidaklah penting dilakukan. Pokoknya dengar dan taati (*sami'na wa-ata'na* “aku dengar dan aku taat.”). Semua jenis pertanyaan dari umatnya yang beragama akan ditekan. Supaya tidak terganggu, dalam beberapa kasus ekstrem, semua pengikut harus diisolasi, tidak boleh bergaul dengan keragaman, apalagi membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang di luar kelompoknya. Bahwa semua orang punya kemampuan dan batas yang berbeda, karena hidup di negara yang berbeda, tidak perlu dihiraukan. Kalau sistem sosial, politik, ekonomi dan budayanya tidak sama dengan Islam, ubah agar sesuai dengan Islam. Kalau ada orang atau kelompok yang menolak, paksa atau perangi.

Bagi kalangan pro-aktif, beragama adalah partisipasi kemanusiaan kita secara terbuka dalam beragama. Karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, semua anggota alam semesta, terutama manusianya, harus diperlakukan sejajar agar bisa saling belajar dan memperkaya sehingga tumbuh bersama. Ajaran Ahlussunnah wal-Jamaah dilihatnya sebagai kesempatan membangun kebersamaan (jamaah) dimana keragaman yang pasti ada dalam setiap komunitas itu dirayakan dan diolah secara kreatif agar melahirkan kekuatan besar. Berislam adalah sebuah proses dialog panjang antara nilai-nilai ketuhanan yang tak terbatas dengan kemanusiaan yang sangat terbatas. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam yang tak terbatas dalam ruang dan waktu dengan batas sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda-beda? Sementara titik tekan pro-pasif adalah penyeragaman, dimana yang berbeda dimusuhi bahkan disingkirkan, titik tekan pro aktif adalah keragam-

an, dimana perbedaan diolah secara kreatif untuk mencapai kebaikan maksimal untuk mewujudkan tujuan agama.

Keinginan mewujudkan kebaikan manusia dan alam semesta sebagai tujuan tertinggi agama, kelompok pro-aktif akan menjadikan keragaman adat, tradisi, dan budaya yang ada dalam ruang dan waktu yang berbeda sebagai teman tumbuh dalam beragama. Mereka bukan musuh yang harus dihilangkan. Bisakah manusia hidup tanpa adat, tradisi dan budaya? Apakah Nabi hidup tanpa adat, tradisi dan budaya? Apakah adat, tradisi dan budaya Arab yang dihidupi Nabi sama dengan Islam sehingga semuanya harus diikuti kalau mau menjadi seorang Muslim yang sejati? Kalau diganti, apa gantiya? Bagaimana dengan para imam, para ulama yang hidup setelah Nabi di tempat-tempat yang berbeda latar belakangnya? Kenapa mereka melahirkan keragaman madhhab dalam semua cabang ilmu (hukum Islam, kalam, tafsir,

sufisme, filsafat, sains)? Pertanyaan-pertanyaan sejenis itu akan ada dalam diri para pro-aktif dan berusaha menjawabnya secara baik sehingga bisa dimengerti oleh keragaman manusia, baik Islam maupun non-Islam, karena sesuai dengan tujuan agama. Kita harus berpikir, dan mengambil i'tibar dalam beragama melalui pelajaran yang diambil dari umat-umat sebelumnya, lalu kekayaan pengalaman umat manusia yang beragama itu, baik pengalaman berhasil maupun gagal, dipelajari bersama untuk tumbuh bersama.

Semangat kebersamaan berjamaah dalam keragaman ruang dan waktu, dengan segala kekayaan tradisi, adat dan budaya yang ada di dalamnya itu, lalu diberi label yang berbeda-beda: Islam Nusantara, pribumisasi Islam, Islam kontekstual, Islam kultural, Islam rasional, Islam berkemajuan dan mungkin lebih banyak lagi kata-kata yang kurang lebih menjelaskan proses tersebut. Sesuai dengan akar kata Islam *aslama*, berislam adalah sebuah

proses panjang untuk berusaha selamat, walau tanpa jaminan dan kepastian bahwa kita akan selamat. Sebagai Dzat Yang Maha Segala-galanya, Allah yang akan menentukan apakah amal kita akan diterima atau ditolak, kelak di akhirat akan masuk surga atau masuk neraka. Kalaupun kita masuk surga pasti bukan karena amal baik kita, karena semua amal baik kita ini hanya setitik debu saja dari kebaikan Allah kepada kita yang jumlahnya tak

terhingga. Bagaimana dengan amal yang setitik itu merasa berhak meminta surga-Nya? Ketidakpastian ini telah membuka peluang yang sangat besar bagi kita untuk mengerahkan semua daya dan upaya kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemanusiaan kita agar kita mendapatkan ridho-Nya. Apapun latar belakang kita. Kebaikan yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Apapun latar belakang mereka.

BAB 6 | AKHIR UNTUK AWAL

Akhirnya kita sampai di penghujung buku. Penghujung yang menjelaskan awal dari penulisan buku ini. Pertama sekali, rasanya penting kami sampaikan bahwa darimana sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di bab-bab sebelumnya muncul? Pertanyaan ini kami dapat *pertama* dari serial Webinar Moderasi Beragama yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta selama pandemi Covid-19 ini. Webinar ini berupaya menampilkan Moderasi Beragama dari berbagai perspektif, mulai dari pemerintah,

peneliti, aktivis, artis, perempuan, pemuka agama, komedian, influencer, konten kreator, orang asing, duta besar, dan banyak lagi. Singkatnya, kami berupaya menghadirkan Moderasi Beragama yang tidak hanya satu perspektif, meskipun bermuara pada satu ujung yang sama: penghormatan tertinggi pada keyakinan beragama orang lain. Tentu saja, seperti webinar pada umumnya, banyak peserta, yang juga datang dari berbagai kalangan itu, bertanya kepada narasumber. Banyak sekali pertanyaan yang kami kumpulkan dari webinar ini.

Kedua, kami mengumpulkan pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan bisa saja dari pembuat konten ataupun para penonton yang memberikan komentar. Semenjak dirilis oleh pemerintah, kebijakan moderasi beragama banyak diperbincangkan di YouTube. Inilah yang menjadi dasar mengapa pertanyaan-pertanyaan di platform ini wajib kami tampung. Selain itu, pertanyaan dari para konten kreator ini biasanya punya tendensi tersendiri, tergantung siapa pembuatnya. Bila yang membuat orang yang tidak suka dengan moderasi beragama, maka pertanyaan yang diajukan mengenai moderasi beragama akan dijawab “nyinyir”. Begitupun sebaliknya.

Ketiga, kami juga menampung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada *Buku Saku Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). Isi dari buku Kemenag tersebut dimaksudkan sebagai bacaan ringkas untuk memahami

moderasi beragama. Bentuknya sangat sederhana, sehingga pertanyaan yang diajukan pun sederhana dan dijawab dengan sederhana pula. Meski begitu, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu wajib kami tuangkan kembali dalam buku yang sedang dibaca ini, sebagaimana bisa dilihat pada Bab 1. Ini supaya pembaca tidak kehilangan landasan dalam mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu.

Keempat, kami melakukan diskusi untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan perlu dijawab tapi tidak kami temukan dalam pengumpulan-pengumpulan pertanyaan sebelumnya. Diskusi ini rutin kami lakukan seminggu sekali, setiap hari Kamis sehabis Shalat Zuhur. Semoga diskusi ini dapat menampung pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya dijawab oleh kami, daripada dijawab orang lain tapi menimbulkan kesesatan di kalangan masyarakat. Agak

pongah, tapi kami sadar bahwa kami lebih banyak pandirnya. Semoga dimaafkan oleh pembaca.

Setelah pertanyaan terkumpul, kami melakukan penyortiran. Agak sulit menyortir pertanyaan-pertanyaan yang *bejibun* itu untuk dipilih beberapa puluh saja. Kami akhirnya mempersatukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mirip atau dekat. Kami juga membuang pertanyaan yang tidak terlalu terkait dengan esensi moderasi: bagaimana membuat konten moderasi beragama untuk kaum muda. Tentu saja berat bagi kami mengeliminasi pertanyaan semacam itu. Sebab bagaimanapun, sebuah pertanyaan diajukan melalui proses berpikir seseorang. Rasanya dzalim bagi kami bila tidak menjawabnya. Namun karena alasan keterbatasan kata, terpaksa tidak bisa kami libatkan banyak pertanyaan ke dalam buku ini.

Proses menjawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan juga tidak mudah. Penulis-penulis, dengan keahliannya yang beragam, mulai dari

ahli hadits, ahli manuskrip Nusantara, ahli sejarah Islam klasik, ahli diplomasi di dunia Islam, ahli terorisme, hingga ahli sejarah Indonesia dan kolonial, berusaha menjabarkan pertanyaan yang ada. Dengan latar belakang yang beragam ini, kami berupaya mencari titik tengah agar jawaban dapat diterima oleh segala pihak. Ini juga upaya kami dalam mengamalkan moderasi beragama dalam menjawab pertanyaan terkait moderasi beragama. Hasilnya, dapat dibaca dalam buku ini.

Selain itu, sebagai sebuah buku suplemen dari buku sebelumnya yang berjudul *Akar Persoalan Kebangsaan: Jawaban Moderasi Beragama* (2021), kami juga berupaya menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan buku ini. Beda dengan buku tanya jawab, buku *Akar Persoalan Kebangsaan* dilakukan lebih metodologis dan mengikuti kaidah-kaidah penelitian, meskipun tidak begitu baik. Karena berangkat dari buku yang, katakanlah, serius, maka kami berharap buku tanya jawab ini bisa merepre-

sentasikan keseriusan itu dalam bentuk yang tidak begitu serius. Sehingga, para pembaca bisa memahami jawaban-jawaban yang ada dengan lebih mudah.

Akhirul kalam, buku ini bukanlah akhir dari moderasi beragama. Sebagai titik tengah, moderasi beragama selalu mencari titik-titik tengah yang baru di tengah titik ekstrem yang selalu baru juga. Dia dinamis mengikuti dinamika titik ekstrem.

Sama seperti buku ini. Bila di kemudian hari muncul pertanyaan-pertanyaan baru di ruang publik yang harus dijawab secara serius, kami akan memperkaya buku ini dan mencoba mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan baru tersebut dalam buku ini (versi pengayaan). Buku ini dinamis sekaligus buku yang menangkap dinamika itu sendiri. Terutama dinamika di ruang publik mengenai moderasi beragama.

